

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan baik.

LAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan wujud tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Banjarmasin, 10 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


M. FITRI HERNADI, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19751102199412 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026. LAKIP ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis yang disajikan pada tabel berikut :

Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
1	Terwujudnya Konektivitas Provinsi	103%	Sangat Memuaskan
2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	122 %	Sangat Memuaskan
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	99 %	Sangat Memuaskan
4	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	100 %	Sangat Memuaskan
Rata-Rata Capaian		104 %	Sangat Memuaskan

Dari 4 (empat) sasaran strategis Dinas Perhubungan yang dijanjikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 didukung oleh 4 indikator, terdapat 5 indikator kinerja yang telah mencapai dan melebihi dari target yang yaitu 104 % Sangat Memuaskan, dengan rincian 86 (Delapan Puluh Enam) Indikator Kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Memuaskan, 7 (tujuh) Indikator Kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Memuaskan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Baik.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 244.157.956.754,-. Serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 194.511.197.560,- atau 79.67 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 49.646.759.194,- atau 20.33%. UPTD Terminal Tipe B pada tahun 2024 mendapatkan

pagu anggaran sebesar Rp. 3.766.000.000,- dengan serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 3.574.485.20,- atau 94.91.

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain :

1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada masing – masing bidang sesuai dengan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Memaksimalkan pelaksanaan tercapainya proyekt strategis pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana Terminal Tipe B
4. Koordinasi sinergitas, kerjasama dan perlunya dukungan instansi lain (Kementerian Perhubungan, Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Organisasi, Kemenpan RB, Dishub Kab/Kota, BPTD Wil. XV Prov. Kalsel).
5. Peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di sektor perhubungan untuk mewujudkan program visi dan misi gubernur;
6. Peningkatan komitmen unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dalam penerapan manajemen berbasis kinerja khususnya dalam hal perencanaan kinerja, maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
7. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang akan berpengaruh pada rencana strategis, kegiatan dan program Dinas Perhubungan;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja guna meningkatkan kualitas pengukuran kinerja.
9. Mengembangkan inovasi yang mengedepankan perkembangan teknologi dan informasi.
10. Memenuhi ketersediaan data dan informasi sektor perhubungan
11. Meningkatkan efektivitas kinerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan	10
E. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	13
B. Rencana Strategis Jangka Menengah	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	17
D. Critical Success Factors (CSF)	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
A. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	43
1. Sasaran RPJMD	44
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan	49
3. Eselon III (Sekretaris)	54
4. Eselon III (Kepala Bidang Pelayaran)	80
5. Eselon III (Kepala Bidang Angkutan Jalan)	100
6. Eselon III (Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan)	124
7. Eselon III (Kepala UPTD Terminal Tipe B)	142

B.	Akuntabilitas Keuangan.....	164
	Akuntabilitas Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan:.....	164
1.	Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024	164
2.	Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.	180
3.	Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024.....	182
4.	Analisa Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	189
	BAB IV PENUTUP	192
A.	Simpulan	192
B.	Strategi Peningkatan Kinerja.....	193

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Visi - Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026	13
Tabel 2. 2	Sasaran Strategis, Arah Kebijakan RPJMD	14
Tabel 2. 3	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dan Target Tahun 2024	18
Tabel 2. 4	<i>Critical Success Factors</i> 2024	36
Tabel 3. 1	Rentang Capaian dan Katagori Capaian	43
Tabel 3. 2	Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	44
Tabel 3. 3	Perbandingan Rasio Konektivitas Provinsi Realisasi	45
Tabel 3. 4	Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Regional Kalimantan	45
Tabel 3. 5	Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional	46
Tabel 3. 6	Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Target SDG's	46
Tabel 3. 7	Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	49
Tabel 3. 8	Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	50
Tabel 3. 9	Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	54
Tabel 3. 10	Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	57
Tabel 3. 11	Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	61
Tabel 3. 12	Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	65
Tabel 3. 13	Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	71
Tabel 3. 14	Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	74
Tabel 3. 15	Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	80
Tabel 3. 16	Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	82
Tabel 3. 17	Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	87
Tabel 3. 18	Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	88
Tabel 3. 19	Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	91
Tabel 3. 20	Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	92
Tabel 3. 21	Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	94

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	96
Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	101
Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	102
Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	105
Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	107
Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	110
Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	111
Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	115
Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	119
Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	125
Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	126
Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	129
Tabel 3. 34 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	130
Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	132
Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	133
Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	136
Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	138
Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	142
Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	143
Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	147
Tabel 3. 42 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	148
Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	151

Tabel 3. 44 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	151
Tabel 3. 45 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	154
Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama	158
Tabel 3. 47 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 Dinas Perhubungan	164
Tabel 3. 48 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 UPTD Terminal Tipe B	177
Tabel 3. 49 Anggaran sasaran program Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.....	180
Tabel 3. 50 Anggaran berdasarkan sasaran program UPTD Terminal Tipe B.....	181
Tabel 3. 51 Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024	182
Tabel 3. 52 Belanja Langsung Dinas Perhubungan	187
Tabel 3. 53 Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024 pada UPTD Terminal.....	187
Tabel 3. 54 Belanja Langsung UPTD Terminal Tipe B	189
Tabel 3. 55 Efektifitas dan Efisiensi Dinas Perhubungan	189
Tabel 3. 56 Efektifitas dan Efisiensi UPTD Terminal Tipe B	190

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	4
Gambar 1. 2 Sumber Daya Manusia (PNS) Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat dan Golongan	6
Gambar 1. 3 Sumber Daya Manusia (PNS) Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi UPTD Terminal Tipe B	7
Gambar 1. 5 Sumber Daya Manusia (PNS) UPTD Terminal Tipe B Berdasarkan Pangkat dan Golongan	9
Gambar 1. 6 Sumber Daya Manusia (PNS) UPTD Terminal Tipe B Berdasarkan Jenis Kelamin.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).

Dasar hukum penyusunan meliputi dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga dapat digunakan sebagai sarana pengukuran kinerja yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan atau sasaran yang telah ditentukan. Setelah ukuran keberhasilan tersebut didapatkan, maka informasi ini juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang.

Komponen kinerja yang disampaikan pada LAKIP ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, serta Perjanjian Kinerja dan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024. Dengan demikian, LAKIP ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran pada Tahun 2024 sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD 2021-2026 dan Renstra 2021-2026.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

a. Dasar Hukum Pembentukan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;

10. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 012 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Peraturan Gubernur Nomor 057 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
14. Peraturan Gubernur Nomor 0154 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Tipe B Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

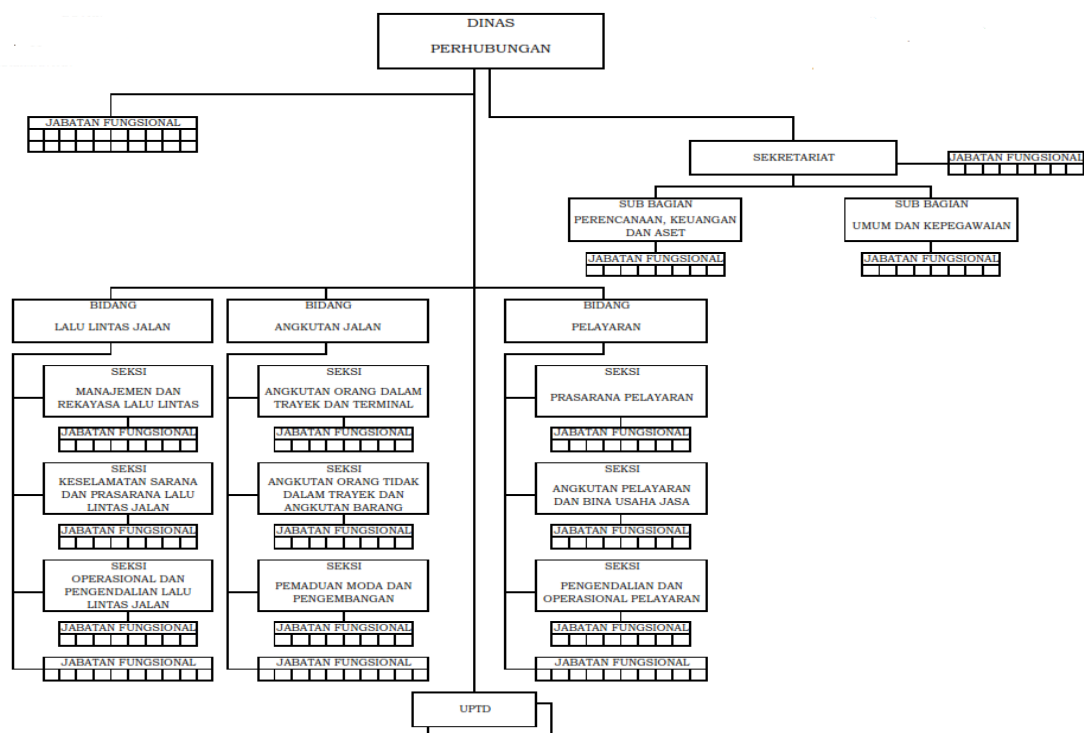
- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan lalu lintas jalan;
- c. pelaksanaan kebijakan Pengembangan angkutan jalan, pepaduan moda transportasi dan pengelolaan terminal;
- d. pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional dan keselamatan angkutan pelayaran;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dijelaskan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang dicantumkan pada peraturan tersebut, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Lalu Lintas Jalan;
- c. Bidang Angkutan Jalan;
- d. Bidang Pelayaran;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- f. Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Gambar 1.1. berikut.



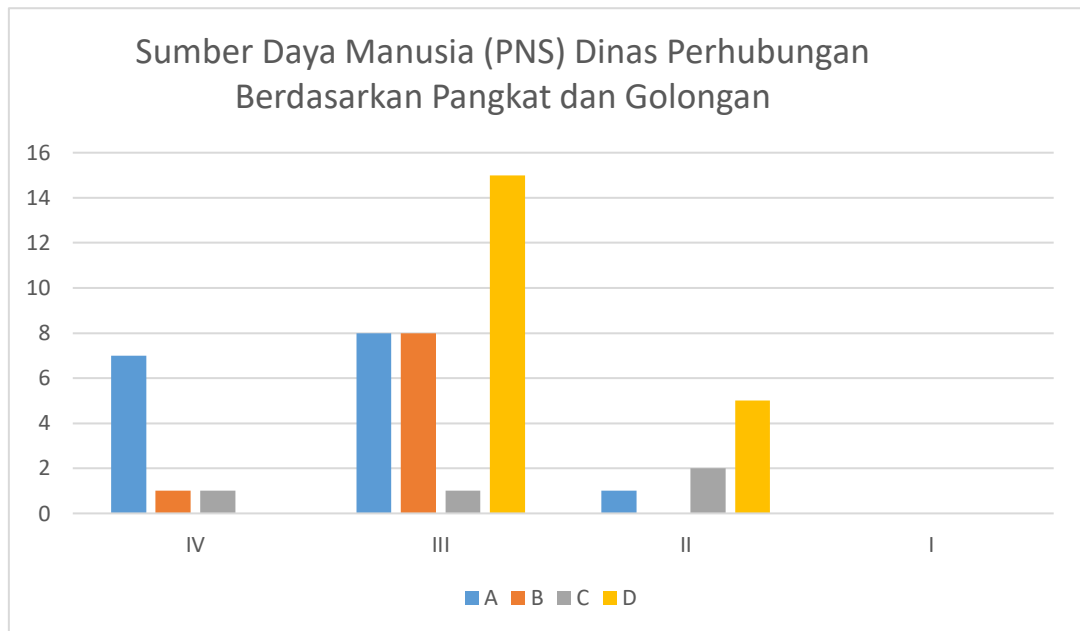
Gambar 1. 1
Struktur Organisasi

Pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 disampaikan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

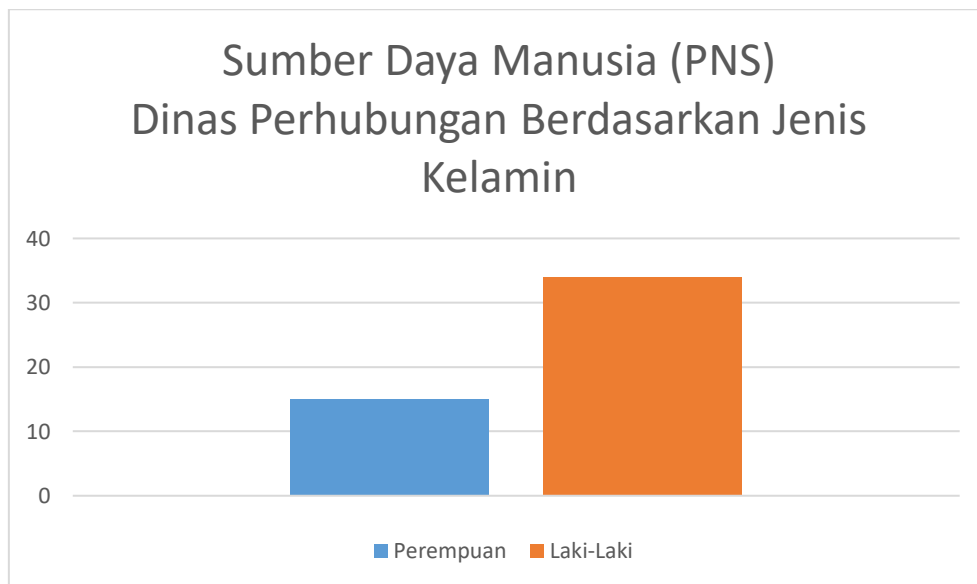
- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan lalu lintas jalan;
- c. pelaksanaan kebijakan Pengembangan angkutan jalan, pepaduan moda transportasi dan pengelolaan terminal;
- d. pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional dan keselamatan angkutan pelayaran;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dilengkapi dengan sumber daya manusia sebanyak 49 orang dengan rincian 1 (satu) (Kepala Dinas), 4 (empat) Esselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang), 11 (sebelas) (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi), 33 (tiga puluh tiga) Staf.

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai komposisi pegawai yang menjadi sumber daya manusia Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan disampaikan pada gambar berikut.



Gambar 1. 2
Sumber Daya Manusia (PNS)
Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

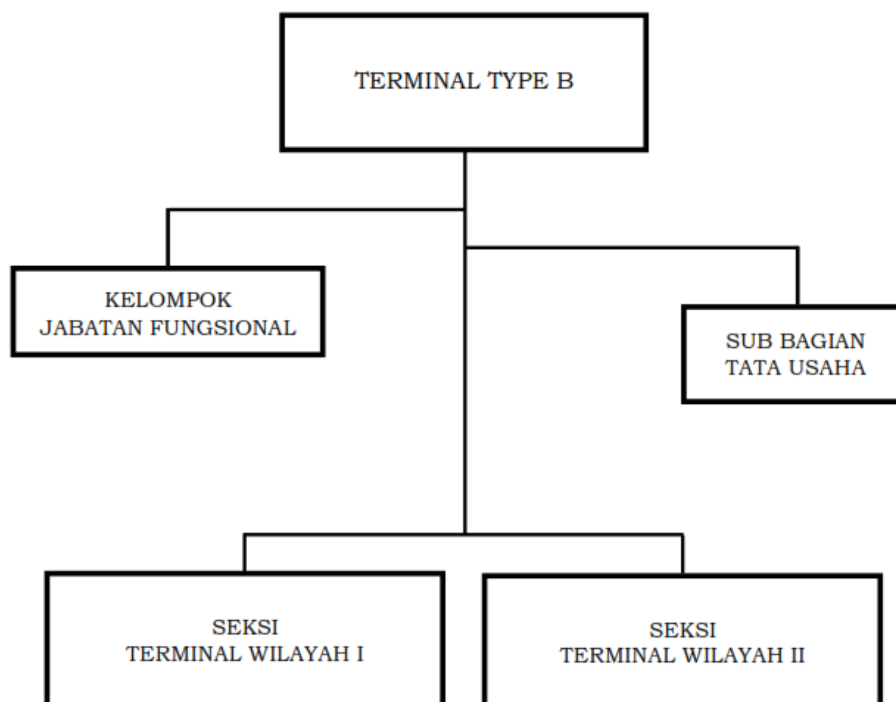


Gambar 1. 3
Sumber Daya Manusia (PNS)
Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu UPTD Terminal Tipe B dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0154 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Tipe B Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 27 Desember 2017. Adapun susunan organisasi UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang dicantumkan pada peraturan tersebut, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Terminal Wilayah I;
- c. Seksi Terminal Wilayah II; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Gambar 1.4. berikut.



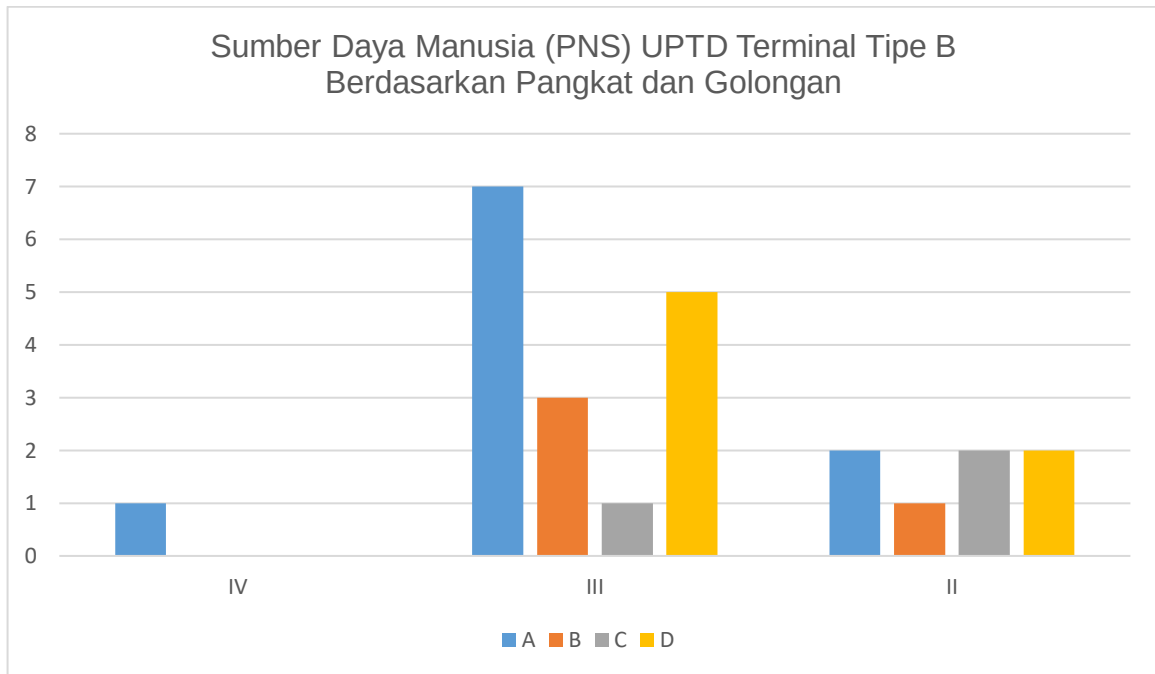
Gambar 1. 4
Struktur Organisasi UPTD Terminal Tipe B

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0154 Tahun 2017 disampaikan bahwa UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan terminal angkutan antar kota dalam provinsi dan keterpaduan dengan angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan, pelayanan penumpang, dan

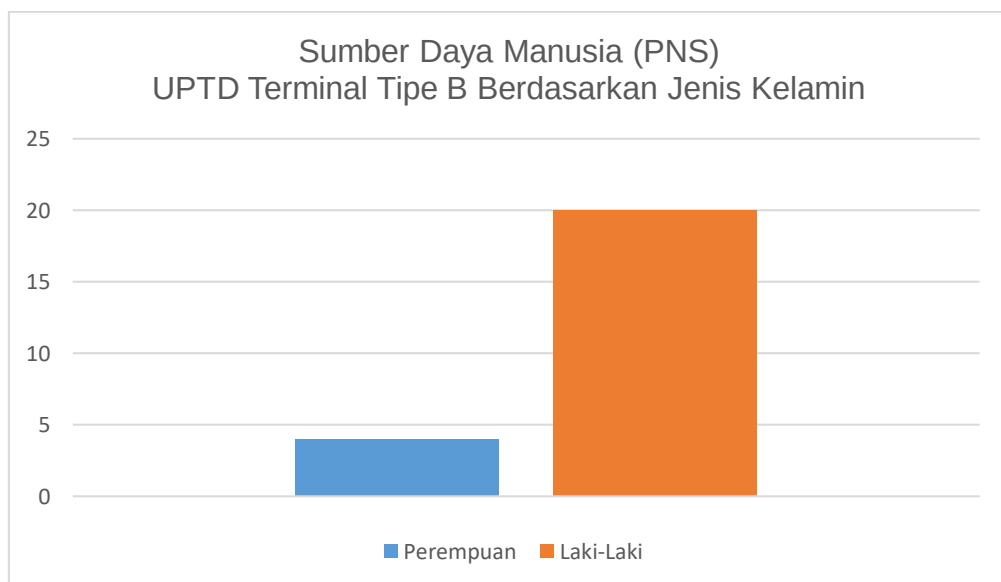
pengembangan serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan terminal, pelayanan penumpang, dan pengembangan serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengaturan kendaraan umum, pengemudi, dan awak kendaraan di dalam terminal;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pelayanan penumpang;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas penunjang terminal;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan penyelenggaraan dan pengoperasian terminal; dan
- f. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0154 Tahun 2017, UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan dilengkapi dengan sumber daya manusia sebanyak 24 orang dengan rincian Kepala UPTD Terminal Tipe B 1 (satu), 3 (tiga) (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi), 20 (dua puluh) Staf. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai komposisi pegawai yang menjadi sumber daya manusia UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan disampaikan pada gambar berikut.



Gambar 1. 5
Sumber Daya Manusia (PNS) UPTD Terminal Tipe B Berdasarkan Pangkat dan Golongan



Gambar 1. 6
Sumber Daya Manusia (PNS) UPTD Terminal Tipe B Berdasarkan Jenis Kelamin

D. Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 serta melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan telah mengidentifikasi beberapa permasalahan dan isu strategis. Permasalahan dan isu-isu strategis yang dimaksud adalah hasil dari analisis kondisi pelayanan serta evaluasi pada periode sebelumnya.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan pada masa pelaksanaan Renja PD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Bidang Pelayaran

- a. Belum optimalnya kelancaran alur pelayaran sungai danau dan penyeberangan;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayaran;
- c. Belum optimalnya sosialisasi/bimbingan keselamatan kepada para operator
- d. angkutan serta masyarakat pengguna jasa angkutan Perairan;
- e. Belum optimalnya kinerja transportasi Perairan;

2. Bidang Lalu Lintas Jalan

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan berlalu lintas di jalan.
- b. Masih perlunya pembinaan terhadap unit pengujian kendaraan bermotor
- c. Masih perlunya koordinasi dan konsolidasi kepada instansi terkait lainnya.
- d. Masih adanya ruas jalan yang belum dilakukan manajemen lalu lintas.
- e. Masih adanya pelanggaran angkutan tambang dan hasil perkebunan yang menggunakan jalan umum.
- f. Belum maksimalnya pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

3. Bidang Angkutan Jalan

- a. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan angkutan jalan, masih diperlukan angkutan jalan untuk menjangkau wilayah perdesaan dan terpencil terutama daerah yang berpotensi cepat tumbuh sehingga jangkauan pelayanan untuk angkutan jalan juga terbatas.

- b. Masih perlu dioptimalisasikannya pelayanan angkutan massal multi moda Banjarbakula.
- c. Belum adanya Studi terkait kebijakan jalur kereta api.
- d. Belum adanya optimalisasi pengawasan terhadap angkutan barang dan angkutan penumpang.
- e. Belum optimalnya pengawasan terhadap Terminal Tipe B.

4. UPTD Terminal Tipe B

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan berlalu lintas di Jalan Keluar-Masuk terminal,
- b. Masih adanya pelanggaran angkutan penumpang/barang dan kendaraan pribadi yang tidak membayar tarif retribusi,
- c. Belum maksimalnya peralatan dan perlengkapan kantor dalam pelaksanaan kegiatan administrasi,
- d. Belum tersedianya sarana dan prasarana terminal untuk penyandang disabilitas maupun fasilitas layanan lain nya,
- e. Belum optimalnya pengawasan terhadap Terminal Tipe B,
- f. Belum optimalnya sosialisasi/bimbingan keselamatan kepada para operator terminal serta masyarakat pengguna jasa angkutan umum,
- g. Belum optimalnya kinerja transportasi di Terminal.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian LAKIP adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2024, dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

- Bab III Adalah akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2024.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Perencanaan dan penetapan kinerja suatu perangkat daerah harus terhubung dan harus disusun berdasarkan Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijelaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam hal ini RPJMD Kalsel Tahun 2021-2026 yang kemudian dijelaskan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra tersebut menjelaskan sasaran strategis jangka menengah yang menjadi pernyataan kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dituangkan ke dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kepala Daerah. Dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja tersebut disusun secara tahunan dan dilaporkan pada Laporan Kinerja ini.

Pernyataan sasaran strategis dan kinerja utama, serta detail RPJMD Prov Kalsel 2021 – 2025 yang dicantumkan pada Sub Bab sebelumnya disusun berdasarkan Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diturunkan menjadi Visi-Misi RPJMD Prov. Kalsel 2021 – 2025. Adapun Visi-Misi Kepala Daerah yang menjadi acuan tersebut disajikan pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2. 1
Visi - Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026

Visi	Misi
“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”	1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur 2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata 3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik 5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

B. Rencana Strategis Jangka Menengah

Sasaran strategis jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dijelaskan pada Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Seperti yang disampaikan sebelumnya, sasaran strategis tersebut harus terhubung dan harus disusun berdasarkan Visi-Misi RPJMD Kalsel Tahun 2021-2026. Adapun Sasaran strategis beserta strategi, arah kebijakan dan hubungannya dengan RPJMD sebagai mana yang tertera pada Dokumen Renstra dijelaskan pada Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2. 2
Sasaran Strategis, Arah Kebijakan RPJMD

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026			
Visi: KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi 3 : Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Tujuan : Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan		Sasaran : Meningkatnya Konektivitas antar kawasan
RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Konektivitas transportasi darat dan Perairan	Rasio Konektivitas	Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis Sustainable Transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi	1. Penyusunan kajian sebagai dasar pengembangan transportasi di Kalsel 2. Membangun sistem angkutan umum massal berbasis jalan melalui pembangunan BRT di kawasan Banjarbakula 3. Pembangunan sarana perpindahan moda transportasi yang

		pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan merata	berintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau. 4. Pengembangan prasarana, sarana dan penunjang operasional angkutan perairan 5. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan instansi terkait guna mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian di Kalimantan Selatan
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Ontime Performance Layanan Transportasi	Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebar dan merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	Peningkatan pelayanan angkutan umum darat dan perairan yang inklusif dan memadai disertai dengan evaluasi kemampuan penyelenggara, dan pengembangan jumlah koridor angkutan aglomerasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau.

	Pelayanan Publik Sektor Transportasi	melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebar dan merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	
Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100.000 keberangkatan	Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Membangun sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan jalan. 2. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutanjalan. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada ruas-ruas jalan provinsi. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan melalui peremajaan, penambahan dan penataan trayek. 5. Menyelenggarakan operasional terminal type B.

			6. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan 7. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
--	--	--	---

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja yang dimaksud pada laporan ini adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja yang diuraikan pada laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang menggambarkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Perumusan Perjanjian Kinerja tersebut didasari pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dan Target Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas provinsi	0.63	KEPALA DINAS
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	<i>On time performance</i> layanan transportasi (Darat dan Air)	59	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	90	
		Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan	2	
	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi umum dengan fatality kecelakaan Per 100.000 Keberangkatan	1,6	
2	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD	100%	Sekretaris
		Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD	100%	
	Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan anggaran SOPD	100%	
		Persentase aset yang tercatat	100%	
	Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	100%	

	Peningkatan kualitas SDM OPD	Persentase pemenuhan pegurusan administrasi kepegawaian	100%	
		Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian	100%	
		Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham	100%	
3	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	83 Paket	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	
	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	
	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 Paket	
	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	12 Bulan	
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	

perundang-undangan			
Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan	
Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik SKPD	Jumlah Website Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	
Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Paket	
Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	
Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	
Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	
Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	

	operasional atau lapangan			
	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	
4	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	Kepala Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Aset
	Tersediannya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Tersediannya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	

dokumen DPA-SKPD			
Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	
Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji an tunjangan tugas ASN	12 Bulan	
Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	

	penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			
	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	
5	Meningkatnya kualitas ketertiban, keselamatan dan kelancaran transportasi perairan	Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar	25,71 %	Kepala Bidang Pelayaran
		Persentase moda transportasi air laik berlayar	73 %	
		Persentase penurunan pelanggaran ketertiban lintas perairan (crosscutting kepolisian daerah)	40 %	
		Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident)	0%	
		Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan	75%	
		Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran	0,274	
		Terselenggaranya angkutan pelayaran dan jasa terkait yang memenuhi standar	17	
6	Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan	9 Unit	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Pelayaran

	dalam 1 (satu) daerah provinsi			
	Terawasinya pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah laporan pengwasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	4 Laporan	
7	Tersedianya dokumen terkait pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dalam system pelayanan perizinan berusaha	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15 Dokumen	Kepala Seksi angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa

	terintegritasi secara elektronik			
	Tersedianya angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan	Jumlah angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha yang memenuhi syarat perizinan	2 Unit	
8	Tersedianya data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten / kota dalam daerah provinsi	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi	5 Dokumen	Kepala Seksi Prasarana Pelayaran
9	Meningkatnya keselamatan, Transportasi	Persentase angkutan umum yang lolos Uji KIR/laik jalan	100%	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
		Persentase kecelakaan angkutan umum di jalan (fatality accident)	0%	
		Persentase penurunan angkutan umum yang	100%	

		melanggar ketertiban lalu lintas		
		Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa	100%	
10	Terlaksananya penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
	Terlaksananya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	6 Laporan	
	Terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi	4 Laporan	
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	6 Laporan	
	Terawasnya pelaksanan rekomendasi andalalin	Jumlah laporan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang terawasi	10 Laporan	
	Terlaksananya Uji coba dan Sosialisasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa	4 Dokumen	

	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
11	Tersedianya Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang tersedia	4006 Unit	Kepala Seksi Keselamatan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Jalan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	704 Unit	
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	13 Laporan	
12	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	12 Laporan	Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian Lalu Lintas
13	Meningkatnya kualitas dan ketertiban angkutan umum di Prov. Kalsel	Persentase terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP	20%	Kepala Bidang Angkutan Jalan
		Persentase terangkutnya barang	100%	

	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan	Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum	80%	
14	Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	91 unit	Kepala Seksi Pemanduan Moda Dan Pengembangan
	Terkendalnya dan terawasinya ketersediaan angkutan umum untuk orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi	420 Laporan	
	Perumusan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringangannya kewenangan provinsi	Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi yang ditetapkan	3 Dokumen	
15	Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Jumlah laporan fasilitasi pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan perizinan	12 Laporan	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Terminal

Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	berusaha terintegrasi secara elektronik		
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi	2 Laporan	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi	12 Laporan	
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Orang dan Angkutan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Laporan	

	Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	
	Terselenggaranya Penyusunan Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	
16	Terlaksananya sosialisasi dan uji coba pelaksanaan	Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah	2 Dokumen	Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak

	kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi	operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi		Dalam Trayek Dan Angkutan Barang
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan provinsi	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan provinsi	4 Laporan	
17	Peningkatan Pelayanan Bidang Transportasi UPTD Terminal Tipe B	Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Terminal Tipe B	77,5%	Kepala UPTD Terminal Tipe B
	Pelayanan Jasa Administrasi Tata Usaha Kantor UPTD Terminal Tipe B	Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B	100%	
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B	100%	

		Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B	100%	
18	Berkembangnya sarana dan prasarana terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	5 Unit	Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah I
	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	1 Unit	
	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	47 Unit	
19	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah II
20	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN terminal tipe b	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	Kasubag TU UPTD Terminal Tipe B
	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penysunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b	1 Laporan	

	penyusunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b			
	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester terminal tipe b	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b	4 Laporan	
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	
	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	
	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 Paket	
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	

perundang-undangan			
Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	166 Laporan	
Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	
Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	
Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	
Tersedianya pemeliharaan perakatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	23 Unit	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Eselon Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

D. Critical Success Factors (CSF)

Critical Success Factors adalah faktor atau variabel yang kritis bagi keberhasilan pelaksanaan proyek yang harus dikerjakan dimana tanpa adanya faktor tersebut maka proyek tidak akan sukses atau berhasil dalam mencapai target atau goal tertentu pada suatu proyek atau pekerjaan.

Tipe critical Success Factors (CFS) terdiri dari :

- a. Industry critical success factors yang dihasilkan dari karakteristik industri tertentu.
- b. Strategy critical success factors yang dihasilkan dari strategi kompetitif yang dipilih usaha.
- c. Environmental critical success factors yang dihasilkan dari perubahan ekonomi atau teknologi.
- d. Temporal critical success factors yang dihasilkan dari kebutuhan organisasi internal dan perubahan.

Critical Success Factors adalah bagian yang tidak terlepasakan dari manajemen proyek dalam tingkatan perencanaan dan program yang telah dilaksanakan dalam proses pekerjaan yang tersub sektor yang telah terlaksana dalam suatu program.

Indikator Kinerja Utama, manajemen proyek terus akan dikembangkan oleh beberapa faktor indikator yang lebih mengutamakan pencapaian target yang menjalankan program kinerja yang telah ada sebelumnya.

Tabel 2. 4
Critical Success Factors 2024

CSF

“TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS PROVINSI”

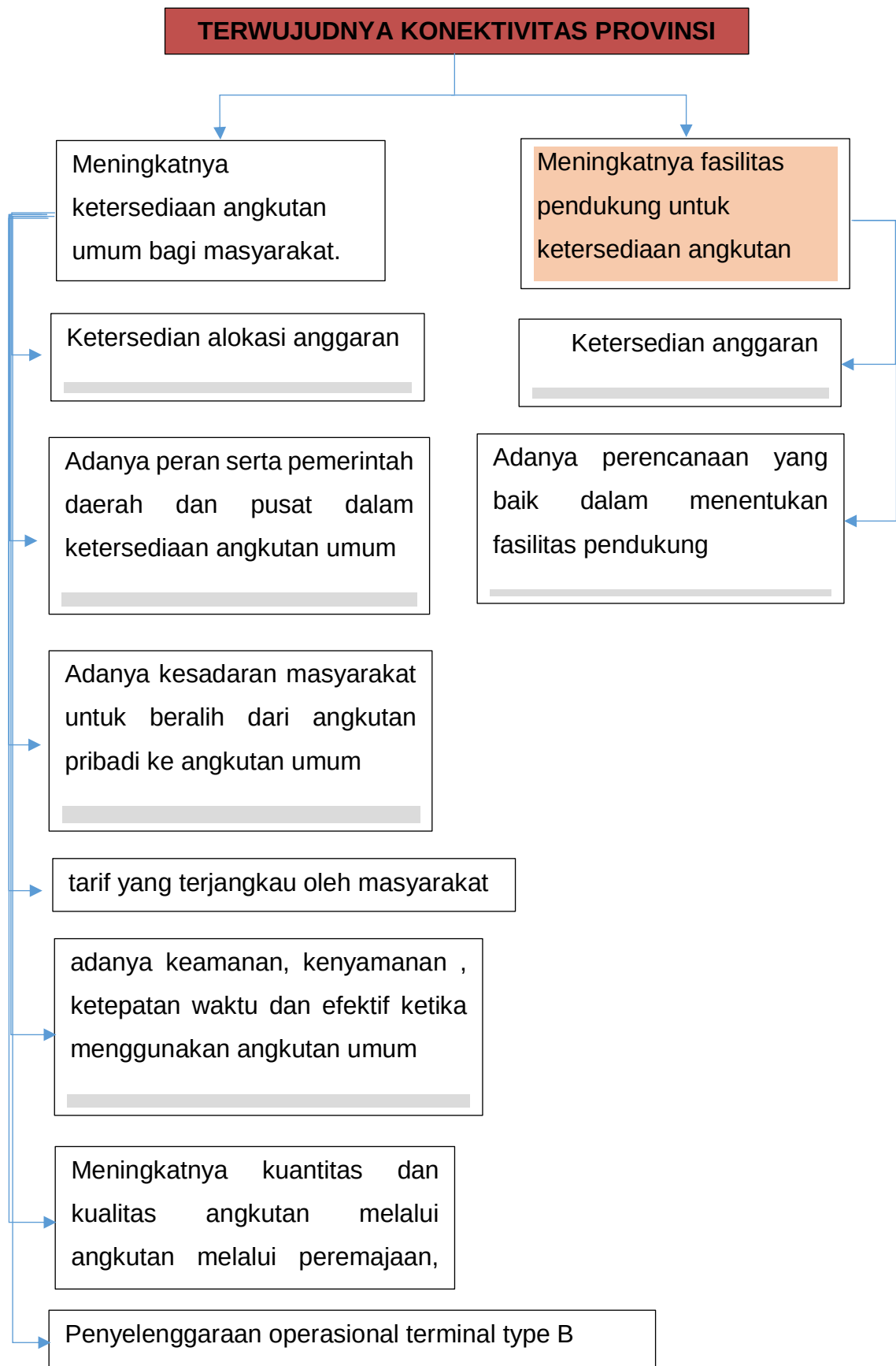
FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
kurangnya ketersediaan angkutan umum	Meningkatnya ketersediaan angkutan umum bagi masyarakat.
Kurangnya fasilitas pendukung untuk ketersediaan angkutan	Meningkatnya fasilitas pendukung untuk ketersediaan angkutan umum

TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS PROVINSI

Meningkatnya
ketersediaan angkutan
umum bagi masyarakat.

Meningkatnya fasilitas
pendukung untuk
ketersediaan angkutan

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya ketersediaan angkutan umum bagi masyarakat.	• Ketersedian alokasi anggaran • Adanya peran serta pemerintah daerah dan pusat dalam ketersediaan angkutan umum • Adanya kesadaran masyarakat untuk beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum • adanya daya tarik masyarakat untuk menggunakan angkutan umum • tarif yang terjangkau oleh masyarakat • adanya keamanan, kenyamanan , ketepatan waktu dan efektif ketika menggunakan angkutan umum • Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan melalui melalui peremajaan, penambahan armada dan penataan trayek • Penyelenggaraan operasional terminal type B
Meningkatnya faslilitas pendukung untuk ketersediaan angkutan umum	• Ketersedian anggaran • Adanya perencanaan yang baik dalam menentukan fasilitas pendukung.



CSF

“MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PERHUBUNGAN”

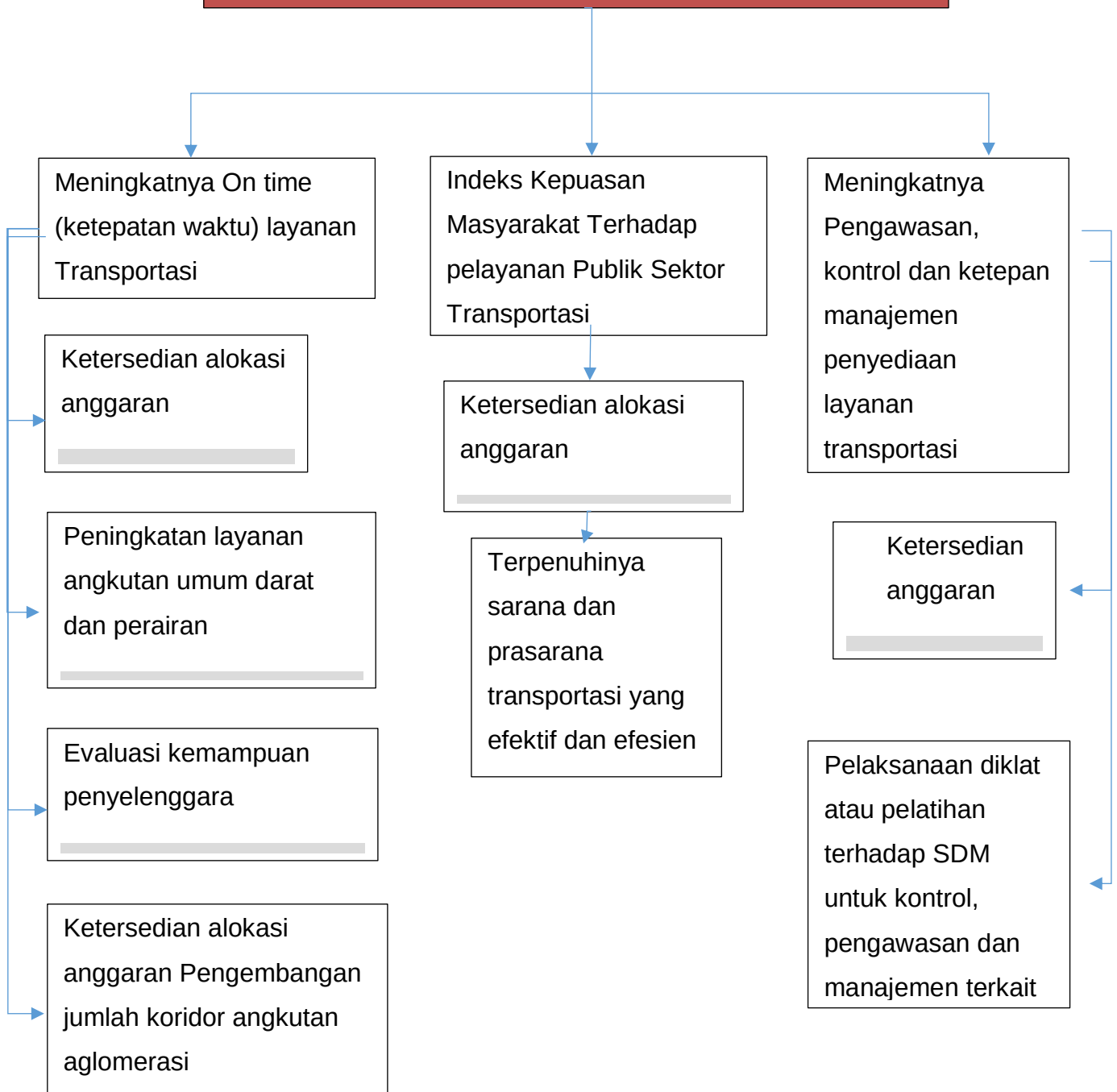
FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
kurangnya On time (ketepatan waktu) layanan Transportasi	Meningkatnya On time (ketepatan waktu) layanan Transportasi
Kurangnya Sumber daya manusia yang paham terkait manajemen pelayanan transportasi	Meningkatnya Pengawasan, kontrol dan ketepatan manajemen penyediaan layanan transportasi

MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PERHUBUNGAN

Meningkatnya On time (ketepatan waktu) layanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik Sektor Transportasi	Meningkatnya Pengawasan, kontrol dan ketepatan manajemen penyediaan layanan transportasi
---	--	--

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya On time (ketepatan waktu) layanan Transportasi	• Ketersediaan alokasi anggaran • Peningkatan layanan angkutan umum darat dan perairan • Evaluasi kemampuan penyelenggara • Pengembangan jumlah koridor angkutan aglomerasi
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik Sektor Transportasi	• Ketersediaan anggaran • Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang efektif dan efisien
Meningkatnya Pengawasan, kontrol dan ketepatan manajemen penyediaan layanan transportasi	• Ketersediaan anggaran • Pelaksanaan diklat atau pelatihan terhadap SDM untuk kontrol, pengawasan dan manajemen terkait layanan transportasi

MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PERHUBUNGAN



CSF

“MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI”

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
kurangnya ketersediaan pelayanan publik	Meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat
Kurang Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Inovasi pelayanan publik yang diterapkan

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

Meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat

Meningkatkan Inovasi pelayanan publik yang diterapkan

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat	- Ketersediaan anggaran - Meningkatkan pelayanan angkutan umum baik darat maupun angkutan sungai, danau dan penyelenggaran.
Meningkatkan Inovasi pelayanan publik yang diterapkan	- Ketersediaan anggaran - Meningkatkan Inovasi pelayanan publik yang diterapkan

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

Ketersediaan anggaran

Meningkatkan pelayanan angkutan umum baik darat maupun angkutan sungai, danau dan penyelenggaran.

Meningkatkan Inovasi pelayanan publik yang diterapkan

“MENINGKATKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI”

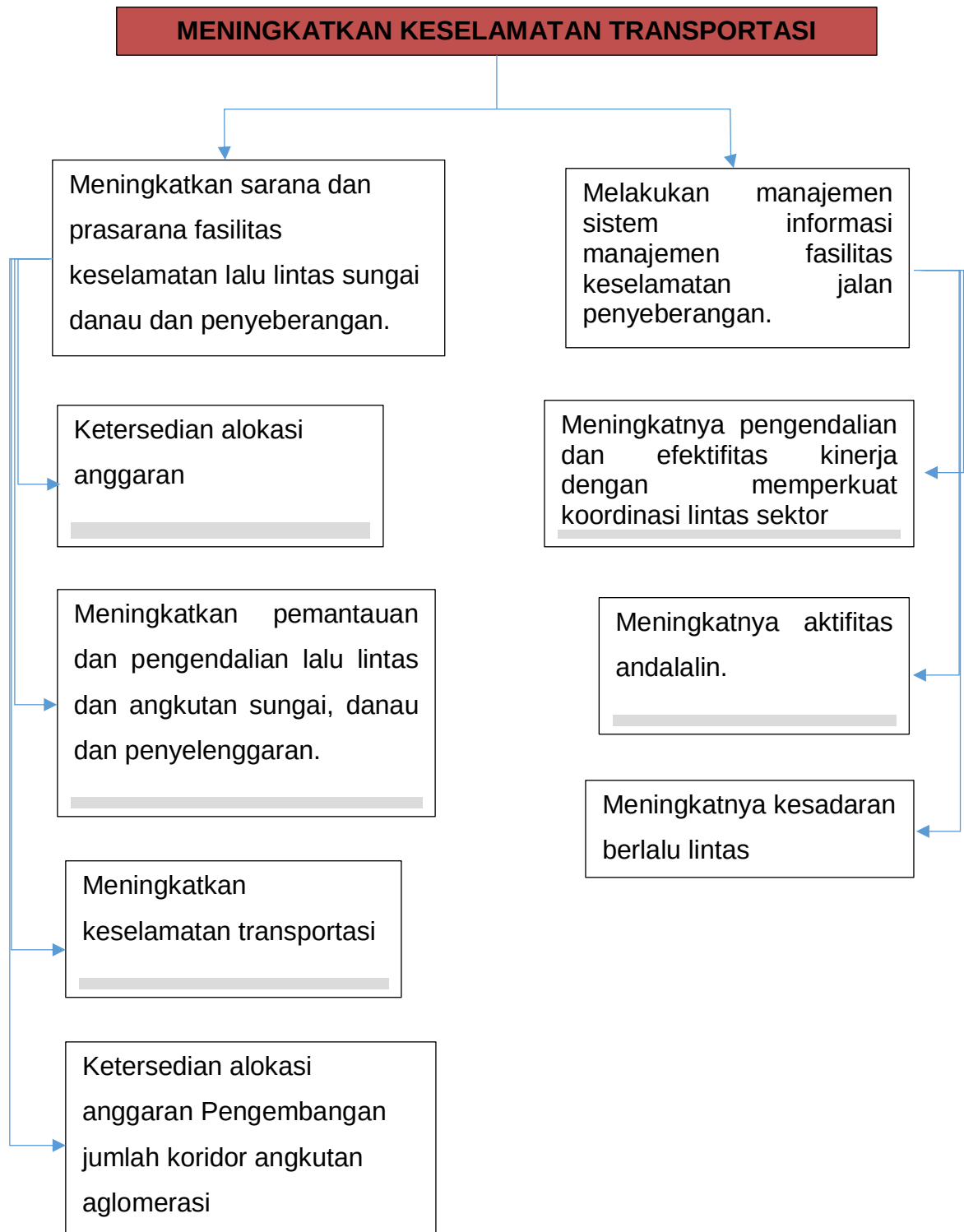
FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan	Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan lalu lintas sungai danau dan penyeberangan.
Kurangnya manajemen terkait rekayasa lalu lintas	Melakukan manajemen sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan jalan

MENINGKATKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas sungai danau dan penyeberangan.

Melakukan manajemen sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan jalan penyeberangan.

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas sungai danau dan penyeberangan.	- Ketersediaan anggaran - Meningkatkan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyelenggaraan. - Meningkatkan keselamatan transportasi
Melakukan manajemen sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan jalan dan penyeberangan.	- Meningkatnya pengendalian dan efektifitas kinerja dengan memperkuat koordinasi lintas sektor - Meningkatnya aktifitas andalalin. - Meningkatnya kesadaran berlalu lintas



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Rentang Capaian dan Katagori Capaian

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% Sampai dengan 90%	Memuaskan
III	Diatas 70% Sampai dengan 80%	Sangat Baik
IV	Diatas 60% Sampai dengan 70%	Baik
V	Diatas 50% Sampai dengan 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

Sumber Data: Permen PAN RB RI Nomor 12 Tahun 2015

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target. Apabila realisasi semakin tinggi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, sebaliknya jika realisasi semakin rendah maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek. Adapun rumus yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Untuk Kinerja Bermakna Positif Jika semakin besar realisasinya maka semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasinya maka semakin buruk kinerjanya, menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Untuk Kinerja Bermakna Negatif Jika semakin besar realisasinya maka semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasinya maka semakin baik kinerjanya, menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Target} * 2 - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

1. Sasaran RPJMD

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Misi ke 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu **“Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian”** dengan sasaran Meningkatnya Konektivitas antar kawasan. Adapun capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Kinerja utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Konektivitas antar kawasan	Terwujudnya konektivitas provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	0.63	0.649	103%
RATA-RATA CAPAIAN						103 %

Sumber data: RPJMD 2021-2026

Rasio Konektivitas Provinsi ditentukan oleh Konektivitas Transportasi Pelayaran dan Konektivitas Transportasi darat. Cara perhitungannya Jumlah Lintas penyebrangan yang dilayani dibandingkan dengan jumlah lintas penyebrangan yang ditetapkan dan Jumlah trayek AKDP yang beroperasi dibandingkan jumlah kebutuhan trayek AKDP yang ditetapkan.

Tabel 3. 3
Perbandingan Rasio Konektivitas Provinsi Realisasi

No	Indikator kinerja	Target RPJMD				Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024
1	Rasio Konektivitas Provinsi	0,57	0,59	0,61	0,63	0,59	0.603	0.603	0.649	103%
Rata-Rata Capaian										103%

Sumber data : LAKIP 2021-2023

Perbandingan Rasio Konektivitas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Se Kalimantan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Regional Kalimantan

Indikator Kinerja : Rasio Konektivitas Provinsi										
No	Provinsi	Target				Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024
1	Kalimantan Selatan	0.63	0,59	0,61	0,63	0,59	0.603	0.603	0.649	103%
2	Kalimantan Timur	0,798	0,816	0,834	0,846	0,798	0,816	0,834	0,846	100%
3	Kalimantan Barat	0.73	0.74	0.75	0.80	0.73	0.75	0.75	0.80	100%
4	Kalimantan Tengah	0,64	0,65	0,66	0,67	0,642	0,648	0,651	0,665	99,25%
5	Kalimantan Utara	0,55	0,55	0,65	0,80	0,62	0,69	0,70	0,70	87,5%

Tabel 3. 5
Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional

No	Indikator	Perbandingan			
		Target Kalsel	Realisasi Kalsel	Target Nasional	Realisasi Nasional
1	Rasio Konektivitas Provinsi	0.63	0.649	0,772	0,763

Sumber: Kementerian Perhubungan RI

Perbandingan Indikator Kinerja Kalimantan Selatan dengan Target SDG's dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 6
Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Target SDG's

No	Indikator Kinerja SDG's	Perbandingan		
		Target Kalsel	Realisasi Kalsel	Target SDG's
1	Jumlah pelabuhan penyeberangan	9 Unit	9 Unit	23 Buah
2	Jumlah pelabuhan strategis	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Dan Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pencapaian indikator Rasio Konektivitas Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 terealisasi sebesar 0.649 dari target 0.63 sehingga persentase capaian Rasio Konektivitas Provinsi pada tahun 2024 sebesar 103%. Nilai tersebut menyatakan bahwa Rasio Konektivitas Provinsi di Kalimantan Selatan berstatus sangat memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa tujuan pembangunan bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meningkat dengan sangat memuaskan.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Pada indikator kinerja yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 yaitu "Rasio Konektivitas Provinsi" pada tahun 2024 terealisasi sebesar 0.649. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 yaitu sebesar 0.603. Dilihat dari data tersebut naik 0.046 dari tahun 2023.

Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi peningkatan 0.011 dengan rata-rata realisasi 0.611 dari tahun 2021-2024 dengan rata-rata target 0.6 tahun 2021-2024.

Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi peningkatan 0.011 dengan rata-rata realisasi 0.611 dari tahun 2021-2024 dengan rata-rata target 0.6 tahun 2021-2024 dimana sudah mencapai target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun ini sebesar 0.649 lebih rendah dari target nasional sekitar 0.772.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

1) Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
- b. Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- c. Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
- d. Meningkatkan Jalur konektivitas provinsi dengan penambahan Jumlah Trayek yang di layani pada provinsi dan Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi
- e. Pembenanahan secara bertahap dan berkesinambungan terkait sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan Rasio Konektivitas Provinsi.

2) Hambatan dalam pencapaian kinerja

- a. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait ketersediaan angkutan umum.
- b. Kurang optimalnya keterjangkauan wilayah yang dapat di akses oleh sarana transportasi masal yang tersedia.
- c. Kurang maksimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum yang melayani kebutuhan Masyarakat.
- d. Keterbatasan anggaran dalam hal pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

3) Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja, dengan melakukan kerjasama dengan antar sesama pemerintah maupun dengan pihak swasta.
- b. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan Jalur konektivitas provinsi dengan penambahan Jumlah Trayek yang di layani pada provinsi dan Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi.
- d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sektor angkutan umum.
- e. Memaksimalkan pelayanan umum terhadap pelaksanaan dalam hal penyediaan angkutan umum massal.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- c. Program Pengelolaan Pelayanan
- d. Program Pengelolaan Perkeretaapian

2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Esselon II pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mendukung indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Rasio Konektivitas Provinsi dengan sasaran **“Meningkatnya Konektivitas antar kawasan”**. Capaian indikator pada sasaran ini mempunyai andil terhadap keberhasilan capaian Rasio Konektivitas Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3. 7
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Terwujudnya Konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas provinsi	0.63	0.649	103%
2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	<i>On time performance</i> layanan transportasi (Darat dan Air)	59	72,5	122 %
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	90	88.32	98.13 %
		Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan	2	2	100 %
4	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi umum dengan fatality kecelakaan Per 100.000 Keberangkatan	1,6	0	100 %
RATA-RATA CAPAIAN					104 %

Sumber : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024

Perbandingan indikator Esselon II dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 8
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator kinerja	Target				Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024
1	Terwujudnya Konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	0,57	0,59	0,61	0,63	0,59	0.603	0.603	0.649	103%
2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	<i>On time performance</i> layanan transportasi (Darat dan Air)	34	58,5	58,5	59	34	75.5	55.5	72,5	122 %
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	77,5	81,3	81,5	90	80,2	78.9	82.5	88.32	98.13 %
		Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan	-	-	2	2	-	-	2	2	100 %
4	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi umum dengan fatality kecelakaan Per 100.000 Keberangkatan	2,73	2,65	2,6	1,6	0	3.075	1.2	0	100 %
Rata-Rata											104 %

Sumber : RPJMD Kalimantan Selatan 2021-2026 dan LAKIP Dinas Perhubungan 2021-2024

Rumus Perhitungan :

1. Rasio Konektivitas Provinsi = $(IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan})$
 - IK1 (Angkutan Jalan) = $(\text{Jumlah Trayek yang di layani pada provinsi Bobot Trayek}) \div (\text{Jumlah Kebutuhan Trayek Pada Provinsi Tersebut})$
 - IK2 (Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan) = $(\text{Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi tersebut} \times \text{Bobot Lintas}) \div (\text{Jumlah Kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi Tersebut})$

2. *On time performance* layanan transportasi (Darat dan Air)

On time performance (OTP) adalah suatu keadaan ketika waktu keberangkatan dan waktu kedatangan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan

OTP Angkutan sungai (bobot 50%) + OTP Angkutan jalan (bobot 50%)

3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi
Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mendapatkan feedback secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan Oleh setiap Instansi Pemerintah kepada Masyarakat sebagai penerima layanan sata sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara berkesinambungan :

Metode survey

4. Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan
Guna memaksimalkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat dan mencapai kepuasan masyarakat, Dinas Perhubungan terus merancang inovasi yaitu PJU Smart System, Warning Light Smart System dan Sistem aplikasi Manajemen Pengawasan BTS.
5. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi umum dengan fatality kecelakaan Per 100.000 Keberangkatan
Mengukur tingkat keselamatan transportasi dan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi

$$\frac{\text{jumlah kejadian kecelakaan angkutan penumpang dan barang}}{100.000 \text{ Keberangkatan}}$$

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

a. Rasio Konektivitas Provinsi

Masing masing realisasi indikator kinerja yaitu Rasio Konektivitas provinsi pada tahun 2024 sebesar 0.649 dengan target yang ditetapkan yaitu 0.63 sehingga persentase capaian sebesar 103%.

b. On Time Performance Layanan Transportasi (Darat dan Air)

Pada Indikator Kinerja yaitu On Time Performance Layanan Transportasi (Darat dan Air) pada tahun 2024 sebanyak 72,5 dengan target yang ditetapkan yaitu 59 sehingga persentase capaian sebesar 122%.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

Pada Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun 2024 sebanyak 88.32 dengan target yang ditetapkan yaitu 90 sehingga persentase capaian sebesar 98.13%.

d. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 keberangkatan

Pada indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan Pada Tahun 2024 Sebesar 0 Dengan Target Yang Ditetapkan yaitu 1.6 Sehingga persentase capaian sebesar 100 %

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Pada tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi yang pada tahun 2024 targetnya sebesar Capaian dari target Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 82,5%, capaian ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami Kenaikan yaitu 3,6%. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Nasional pada tahun 2023 memiliki target 88,4% dengan capaian target sebesar 94,33%.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

1) Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
- Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
- Meningkatkan Jalur konektivitas provinsi dengan penambahan Jumlah Trayek yang di layani pada provinsi dan Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi
- Meningkatkan On time performance layanan transportasi (Darat dan Air)
- Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi
- Meningkatkan Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan
- Meningkatkan kelengkapan jalan di jalan provinsi

2) Hambatan dalam pencapaian kinerja

Masih kurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum, Kurang optimal nya keterjangkauan wilayah yang dapat di akses oleh sarana transportasi masal yang tersedia, Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih rendah dan terbatas dan lain-lain.

3) Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- b. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan Jalur konektivitas provinsi dengan penambahan Jumlah Trayek yang di layani pada provinsi dan Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi Meningkatkan On time performance layanan transportasi (Darat dan Air)

- d. Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi
- e. Meningkatkan Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan
- f. Meningkatkan kelengkapan jalan di jalan provinsi

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- c. Program Pengelolaan Pelayaran
- d. Program Pengelolaan Perkeretaapian

3. Eselon III (Sekretaris)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 9
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD	100%	100%	100%
		Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD	100%	100%	100%
2		Persentase	100%	79,67 %	79,67 %

	Pelayanan Administrasi Keuangan	penyerapan anggaran SOPD			
		Persentase aset yang tercatat	100%	100%	100%
3	Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	100%	100%	100%
4	Peningkatan kualitas SDM OPD	Persentase pemenuhan pegurusan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%
		Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian	100%	100%	100%
		Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					97,5 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024

Rumus Perhitungan :

- Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD
Jumlah komponen pelaporan LAKIP SOPD dan dokumen kinerja yang dibuat dan dilaporkan
- Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD
Jumlah komponen perencanaan LAKIP SOPD dan dokumen kinerja yang dibuat dan dilaporkan
- Persentase penyerapan anggaran SOPD

Jumlah Realisasi anggaran dibagi dengan rencana anggaran X 100%

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\%$$

- Pesentase Aset Yang Tercatat

Jumlah Aset Yang Dicapat bagi jumlah Asset seluruhnya X 100% :

$$\frac{\text{Jumlah Asset Yang Dicapat}}{\text{Jumlah Asset Seluruhnya}} \times 100\%$$

- Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Perhubungan

Jumlah sarana prasarana yang ada dibagi jumlah sarana prasarana yang di butuhkan X 100%

$$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang ada}}{\text{Jumlah sarana prasarana yang di butuhkan}} \times 100\%$$

- Persentase pemenuhan pegurusan administrasi kepegawaian

$$\frac{\text{Pegurusan administrasi kepegawaian yang terpenuhi}}{\text{Pegurusan administrasi kepegawaian yang di butuhkan}} \times 100\%$$

- Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian

Jumlah ASN SOPD yang mengikuti sertifikat keahlian tahun 2024 dibagi jumlah ASN SOPD yang di butuhkan mengikuti sertifikat keahlian tahun 2024 X 100%

$$\frac{\text{Jumlah ASN SOPD yang mengikuti sertifikat keahlian}}{\text{Jumlah ASN SOPD yang di butuhkan memiliki sertifikat keahlian}} \times 100\%$$

- Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham

Jumlah ASN SOPD yang mengikuti pelatihan / bimtek tahun 2024 dibagi jumlah ASN SOPD yang di butuhkan mengikuti pelatihan / bimtek tahun 2024 X 100%

$$\frac{\text{Jumlah ASN SOPD yang mengikuti pelatihan / bimtek}}{\text{Jumlah ASN SOPD yang di butuhkan mengikuti pelatihan / bimtek}} \times 100\%$$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 10
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penyerapan anggaran SOPD	85,77 %	93.94 %	96,50%	100%	79,67 %	79,67 %
4	Persentase aset yang tercatat	100%	100%	97,69%	100%	100%	100%
5	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase pemenuhan pegurusan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian							97,5 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 100% dan memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu :

- 1) Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.
- 2) Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Pelayanan Administrasi Keuangan mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 89,8 % dan memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase penyerapan anggaran SOPD dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 79,67 % pada tahun 2024.
2. Persentase aset yang tercatat dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 100 % dan memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Peningkatan kualitas SDM OPD mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 100 % dan memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase pemenuhan pegurusan administrasi kepegawaian dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.
2. Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.
3. Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 pada Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran SOPD mendapatkan capaian kinerja sebesar 79,67 % pada tahun 2024.

Dimana pada tahun 2023 Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran SOPD mendapatkan capaian kinerja sebesar 96,5% dan Persentase aset yang tercatat mendapatkan capaian kinerja sebesar 97,69%. Dilihat dari data tersebut pada tahun 2024 capain kinerja pada Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran SOPD mengalami Penurunan yaitu 16,83% dan Persentase aset yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 2,31 % dari pada tahun 2023 .

- b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran SOPD mendapatkan capaian kinerja sebesar 79,67 % tahun 2024, 85,77 % tahun 2021, 93.94 % tahun 2022, 96,50% tahun 2023. Dilihat dari data tersebut pada tahun 2024 capain kinerja pada Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran SOPD mengalami Penurunan 12,4 % dari rata-rata capaian selama tahun 2021 - 2023.

- c. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran SOPD mendapatkan capaian kinerja sebesar 79,67 % tahun 2024 dan sebesar 88,97% rata-rata capaian dari 2021-2024 dilihat dari data tersebut mengalami Penurunan 20,33 % tahun 2024 dan 11,03 % dari 2021-2024 dari target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
- Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja
- Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan
- Meningkatkan Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi dikarenakan adanya keterlambatan pengesahan anggaran perubahan sehingga penjadwalan penyerapan anggaran belum optimal dan beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi karena terbatasnya SDM sehingga kegiatan terlambat untuk diselesaikan.

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
1. Melakukan Reviu Renstra Dinas Perhubungan dengan menggunakan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama berbasis outcome
 2. Menginstruksikan penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari level Eselon II sampai dengan level Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan
 3. Meningkatkan pencatatan aset, meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai bekal pelaksanaan publik yang efektif, serta pelayanan informasi yang optimal, yang dapat

meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap Dinas Perhubungan

4. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

1) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut :

Tabel 3. 11
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Tersediannya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

	penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	penyusunan dokumen RKA-SKPD			
4	Tersediannya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Tersediannya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Tersediannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
8	Tersediannya Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji an	12 Bulan	12 Bulan	100%

		tunjangan tugas ASN			
9	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
10	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
11	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia pada tahun 2024
- Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi yang tersusun
- Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD yaitu Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan kegiatan hasil koordinasi dokumen RKA-SKPD yang tersusun pada tahun 2024

- Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan kegiatan hasil koordinasi dokumen DPA-SKPD yang tersusun pada tahun 2024
- Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD yaitu Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil kegiatan hasil koordinasi dokumen DPA-SKPD yang tersusun pada tahun 2024
- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yaitu jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan kegiatan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun tahun 2024
- Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang terusun tahun 2024
- Jumlah orang yang menerima gaji an tunjangan tugas ASN yaitu Jumlah ASN yang di bayarkan gaji dan tunjangan sesuai dengan jumlah ASN yang menjalankan tugas
- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yaitu jumlah dokumen hasil penyediaan adiministrasi pelaksanaan tugas ASN yang terusun di tahun 2024
- Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yaitu Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan kegiatan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang terususun di tahun 2024
- Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yaitu Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun tahun 2024

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 12
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Buah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Buah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Buah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Buah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

5	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Buah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Buah	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Buah	4 Dokumen	17 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%
8	Jumlah orang yang menerima gaji an tunjangan tugas ASN	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
9	Jumlah dokumen hasil penyediaan	21 Orang	11 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

	administrasi pelaksanaan tugas ASN						
10	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
11	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian							100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersediannya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dan Indikator Kinerja yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersediannya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan

hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersediannya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersediannya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersediannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target 2 Laporan dan realisasi 2 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersediannya Gaji dan Tunjangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan tugas ASN dengan target 12 Bulan dan realisasi 12 Bulan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersediannya administrasi pelaksanaan tugas ASN dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target 12 Dokumen dan realisasi 12 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi sedikit perbedaan dari sisi indikator kinerja dan satuan target yang ditetapkan dan capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024. Dimana tahun 2023-2024 adanya penambahan Sasaran strategis Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan.
- c. Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja
 - Selalu melakukan Koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pelaporan

dan Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Perhubungan Provinsi;

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- 1. Melakukan Reviu Renstra Dinas Perhubungan dengan menggunakan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama berbasis outcome
- 2. Menginstruksikan penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari level Eselon II sampai dengan level Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan
- 3. Meningkatkan pencatatan aset, meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai bekal pelaksanaan publik yang efektif, serta pelayanan informasi yang optimal, yang dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap Dinas Perhubungan

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- 4. Perencanaan, Penggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

2) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut :

Tabel 3. 13
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	83 Paket	83 Paket	100%
2	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	10 Orang	100%
3	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
4	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%
5	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	100%
6	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

8	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	100%
9	Terlaksanya dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik SKPD	Jumlah Website Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
10	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Paket	5 Paket	100%
11	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	39 Unit	100%
12	Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%
13	Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100%
14	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	100%
15	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2 Unit	2 Unit	100%

	bangunan lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yaitu Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia pada tahun 2024
- Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yaitu Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan
- Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik bangunan kantor pada tahun 2024
- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan yaitu Jumlah Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada tahun 2024
- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yaitu Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia
- Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan yaitu Jumlah Cetak dan Penggandaan pada tahun 2024
- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan yaitu Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan pada tahun 2024
- Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yaitu Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Jumlah Website Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yaitu Jumlah website yang dioperasikan dan dikembangkan pada tahun 2024
- Jumlah paket mebel yang disediakan yaitu Jumlah mebel yang disediakan
- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan
- Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan yaitu Jumlah bangunan kantor yang terbayarkan sumber daya air dan listrik pada tahun 2024

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan yaitu Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya yaitu Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara pada tahun 2024
- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 14
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	115 setel	115 Paket	83 Paket	83 Paket	100%
2	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 orang	12 Bulan	14 Orang	10 Orang	10 Orang	100%
3	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Buah	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
4	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1104 Buah	12 Bulan	25 paket	12 Bulan	12 Bulan	100%
5	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	100 unit / tahun	12 Bulan	11 Paket	6 Paket	6 Paket	100%

	disediakan						
6	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	85658 Buah	12 Bulan	12 paket	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7817 Buah	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	88 orang	12 Bulan	12 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%
9	Jumlah Website Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Buah	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
10	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Dokumen	12 Bulan	1 Paket	5 Paket	5 Paket	100%
11	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	12 Bulan	13 Unit	39 Unit	39 Unit	100%
12	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Buah	12 Bulan	12 Bulan	3 Laporan	3 Laporan	100%
13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Buah	12 Bulan	12 Bulan	2 Laporan	2 Laporan	100%
14	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	34 Buah	12 Bulan	29 Unit	34 Unit	34 Unit	100%

	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
15	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Buah	12 Bulan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%
Rata-Rata Capaian							100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan target 83 paket dan realisasi 83 paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target 10 Orang dan realisasi 10 Orang sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 1 paket dan realisasi 1 paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 12 Bulan dan realisasi 12 Bulan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya bahan logistik kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan

target 6 paket dan realisasi 6 paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya barang cetakan dan pengadaan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan dengan target 12 Bulan dan realisasi 12 Bulan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 20 Laporan dan realisasi 20 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Website Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya Mebel dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket mebel yang disediakan dengan target 5 Paket dan realisasi 5 Paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target 39 Unit dan realisasi 39 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 3 Laporan dan realisasi 3 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 2 Laporan dan realisasi 2 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 34 Unit dan realisasi 34 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target 2 Unit dan realisasi 2 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi sedikit perbedaan dari sisi sasaran strategis dan satuan target yang ditetapkan dan capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024. Dimana tahun 2022-2024 adanya penambahan Sasaran strategis Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dan Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya dengan Indikator Kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan dari sisi sasaran strategis dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian

kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Meningkatkan Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan

- c. Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan administrasi perkantoran, kepegawaian, dan sarana/prasarana untuk menunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran dan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatkan Disiplin Aparatur, menunjang kelancaran tugas perkantoran Dan meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, terciptanya kualitas kompetensi SDM Kantor untuk menunjang meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4. Eselon III (Kepala Bidang Pelayaran)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut :

Tabel 3. 15
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas ketertiban, keselamatan dan kelancaran transportasi perairan	Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar	25,71 %	22,86 %	88,91 %
		Persentase moda transportasi air laik berlayar	73 %	72,91 %	99,88 %
		Persentase penurunan pelanggaran ketertiban lintas perairan (crosscutting kepolisian daerah)	40 %	40 %	100%
		Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident)	0%	100 %	0 %
		Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan	75%	75 %	100 %
		Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran	0,274	0,27	98,54 %
		Terselenggaranya angkutan pelayaran dan jasa terkait yang memenuhi standar	17	19	100 %
		Rata-Rata Capaian			

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024

Rumus Perhitungan :

Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar

$$PP(p) = \frac{\sum PPs}{\sum PPr} \times 100 \%$$

PP(p) = Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar.

PPs = Jumlah alur pelabuhan yang dipelihara.

PPr = Jumlah alur pelabuhan yang terdaftar.

Persentase moda transportasi air laik berlayar

$$MT(p) = \frac{\sum MTs}{\sum MTr} \times 100 \%$$

MT(p) = Persentase moda transportasi air yang laik layar.

MTs = Jumlah kapal laik layar.

MTr = Jumlah alur pelayaran yang terdaftar.

Persentase penurunan pelanggaran ketertiban lintas perairan (crosscutting kepolisian daerah)

$$JP(p) = \frac{(\sum JPn) - (\sum JPn - 1)}{\sum JPn} \times 100 \%$$

JP(p) = Persentase penurunan pelanggaran ketertiban I perairan.

JPn = Jumlah pelanggaran tahun n.

JPn = Jumlah pelanggaran tahun n-1.

Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident)

$$KPf(p) = \frac{\sum KPf}{\sum KPr} \times 100 \%$$

KPf(p) = Persentase kecelakaan angkutan perairan dengan fata

KPf = Jumlah kecelakaan angkutan perairan dengan fatalita

KPr = Jumlah kecelakaan angkutan perairan yang tercatat

Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan

$$OTP(p) = \frac{\sum LP1}{\sum LPr} \times 100 \%$$

OTP(p) = Presentase on time performance (OTP) trayek lintas pera

LP1 = Jumlah lintas perairan dengan nilai OTP 1.

LPr = Jumlah lintas perairan yang beroperasi.

Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran

IK2 (Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan) = (Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi tersebut X Bobot Lintas) Dibagi (Jumlah Kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi Tersebut)

Terselenggaranya angkutan pelayaran dan jasa terkait yang memenuhi standar yaitu jumlah dokumen angkutan pelayaran yang memenuhi standar

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 16
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar	17.9 %	67,03%	23,07%	25,71 %	22,86 %	88,91 %
2	Persentase moda transportasi air laik berlayar	100 %	23,07%	70,62%	73 %	72,91 %	99,88 %
3	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban lintas perairan (crosscutting	100 %	35%	30%	40 %	40 %	100%

	kepolisian daerah)						
4	Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident)	0 %	0%	0%	0%	100 %	0 %
5	Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan	100 %	66%	66%	75%	75 %	100 %
6	Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran		-	-	0,274	0,27	98,54 %
7	Terselenggaranya angkutan pelayaran dan jasa terkait yang memenuhi standar		-	-	17	19	100 %
Rata-Rata Capaian							83,90%

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas ketertiban, keselamatan dan kelancaran transportasi perairan mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 83,90% dan memiliki 7 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar dengan target 25,71 % dan realisasi 22,86 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 88,91 % pada tahun 2024.
2. Persentase moda transportasi air laik berlayar dengan target 73 % dan realisasi 72,91 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 99,88 % pada tahun 2024.
3. Persentase penurunan pelanggaran ketertiban lintas perairan (crosscutting kepolisian daerah) dengan target 40% dan realisasi 40%

sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

4. Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident) dengan target 0% dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 0 % pada tahun 2024.
5. Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan dengan target 75% dan realisasi 75% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.
6. Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran dengan target 0.274% dan realisasi 0.27% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 98.54 % pada tahun 2024.
7. Terselenggaranya angkutan pelayaran dan jasa terkait yang memenuhi standar dengan target 17 dokumen dan realisasi 19 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 pada Indikator Kinerja Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar mendapatkan realisasi kinerja sebesar 22,86 %pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi kinerja sebesar 23,07%. Dilihat dari data tersebut terjadi penurunan 0.21 %.

Indikator Kinerja Persentase moda transportasi air laik berlayar mendapatkan realisasi kinerja sebesar 72.91 %pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi kinerja sebesar 70.62%. Dilihat dari data tersebut terjadi kenaikan 2.29 %.

Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran ketertiban lintas perairan (crosscutting kepolisian daerah) mendapatkan realisasi kinerja sebesar 40 % pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi kinerja sebesar 30%. Dilihat dari data tersebut terjadi kenaikan 10 %.

Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident) mendapatkan realisasi kinerja sebesar 0 % pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi kinerja sebesar 0%.

Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan mendapatkan realisasi kinerja sebesar 40 % pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi kinerja sebesar 30%. Dilihat dari data tersebut terjadi kenaikan 10 %.

Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran mendapatkan realisasi kinerja sebesar 0.27 pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 tidak ada indikator kinerja sehingga tidak ada perbandingan.

Terselenggaranya angkutan pelayaran dan jasa terkait yang memenuhi standar mendapatkan realisasi kinerja sebesar 19 pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 tidak ada indikator kinerja sehingga tidak ada perbandingan.

- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya rata-rata capaian kinerja sebesar 83,90% tahun 2024. Dimana tahun 2021-2023 rata-rata capaian kinerja 98.38 % dan adanya penambahan indikator kinerja 2 buah yaitu Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran dan Terselenggaranya angkutan pelayaran dan jasa terkait yang memenuhi standar sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan dari sisi indikator kinerja dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta rata-rata capaian kinerja sebesar 83,90% tahun 2024 dan sebesar 95.57 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan yang dihadapi luasnya jangkauan lokasi kegiatan serta keterbatasan anggaran dan ditentukan oleh cuaca dan factor alam serta factor teknis lainnya seperti pasang surut air sungai, kondisi peralatan dan SDM di lapangan.

c. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- 2) Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Pengelolaan Pelayaran.

1) Eselon IV (Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Angkutan Pelayaran)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 17
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan	9 Unit	9 Unit	100%
2	Terawasinya pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah laporan pengwasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	4 Laporan	4 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan yaitu Jumlah alur pelabuhan sungai yang terpelihara.

- Jumlah laporan pengwasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi yaitu Jumlah laporan pengawasan yang dibuat.

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 18
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan	-	14 Kab/kota	8 Unit	9 Unit	9 Unit	100%
2	Jumlah laporan pengwasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	13 Buah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian							100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan dengan target 9 Unit dan realisasi 9 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran Strategis Terawasinya pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 94,5%. Dilihat dari data tersebut terjadi kenaikan 5,5 %.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi sedikit perbedaan dari sisi sasaran strategis dan satuan target yang ditetapkan dan capaian kinerja sebesar 98.63 % selama tahun 2021-2024. Dimana tahun 2022-2024 adanya penambahan Sasaran strategis Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan dari sisi sasaran strategis dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja

serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 98.63 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi luasnya jangkauan lokasi kegiatan serta keterbatasan anggaran dan ditentukan oleh cuaca dan factor alam serta factor teknis lainnya seperti pasang surut air sungai, kondisi peralatan dan SDM di lapangan.

- c. Rencana Tindak Lanjut
- d. Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- e. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Pengelolaan Pelayaran.

- Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2) Eselon IV (Kepala Seksi Prasarana Pelayaran)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Prasarana Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 19
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersedianya data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten / kota dalam daerah provinsi	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yaitu Jumlah Jaringan Lintas Penyeberangan Terdata berbanding dengan Jumlah Jaringan Lintas Penyeberangan Yang Beroperasi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 20
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi	5 Lintasan	5 Lintasan	5 Lintasan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Rata-Rata Capaian							100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten / kota dalam daerah provinsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi dengan target 5 Dokumen dan realisasi 5 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait

- a. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan

- b. Rencana Tindak Lanjut

- g. Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- h. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- i. Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Pengelolaan Pelayaran.

- Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

3) Eselon IV (Kepala Seksi Angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 21
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersedianya dokumen terkait pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan, pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo	15 Dokumen	19 Dokumen	100%

	mandiri, dan depo peti kemas dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2	Tersedianya angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan	Jumlah angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan	2 Unit	2 Unit	100 %
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yaitu Jumlah Jaringan Lintas Penyeberangan Terdata berbanding dengan Jumlah Jaringan Lintas Penyeberangan Yang Beroperasi
- Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu

$$JT(d) = f, fTs$$

JT(d) Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan izin usaha jasa terkait.

f, fTs Penjumlahan dokumen pemenuhan persyaratan tiap – tiap badan usaha jasa terkait.

- Jumlah angkutan laut pelayanan rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan yaitu

$$PR(p) = PRs$$

PR(u) = Jumlah unit angkutan laut pelayanan rakyat kewenangan provinsi.

PRs Penjumlahan tiap — tiap unit badan usaha angkutan laut pelayanan rakyat kewenangan provinsi.

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 22
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	5 Dokumen	15 Dokumen	19 Dokumen	127%

	Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
2	Jumlah angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik	-	2 Rekomendasi	20 Unit	2 Unit	2 Unit	100 %

yang memenuhi syarat perizinan						
Rata-Rata Capaian						100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya dokumen terkait pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan target 15 Dokumen dan realisasi 19 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 127% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan dengan target 2 Unit dan realisasi 2 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024. Dimana tahun 2022-2024 adanya penambahan Sasaran strategis Sasaran strategis Tersedianya angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Pengelolaan Pelayaran.

- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

5. Eselon III (Kepala Bidang Angkutan Jalan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 23
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan ketertiban angkutan umum di Prov. Kalsel	Persentase terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP	20%	20%	100%
		Persentase terangkutnya barang	100%	100%	100%
2	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan	Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum	80%	70%	87.5 %
Rata-Rata Capaian					95.83 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024

Rumus Perhitungan :

Persentase terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP

Target Persentase Terangkutnya Penumpang = P.AU0 + P.AU1

P.AU0 = Persentase pengguna angkutan umum pada tahun dasar

P.AU1 = Peningkatan persentase pengguna angkutan umum yang direncanakan

Persentase terangkutnya barang yaitu Persentase terpenuhinya kebutuhan angkutan barang

Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum yaitu

$$100\% - \frac{(WTeks - WTSPM)}{WTSPM}$$

WTeks = Waktu tempuh eksisting

WTSPM = Waktu tempuh sesuai SPM

Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum yaitu Jumlah angkutan umum yang tepat waktu

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 24
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP	65 %	30.661 Orang	15%	20%	20%	100%
2	Persentase terangkutnya barang	65%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum	-	35%	45%	80%	70%	87.5 %
Rata-Rata Capaian							95.83 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan ketertiban angkutan umum di Prov. Kalsel mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 100% dan memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu :

Persentase terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP dengan target 20 % dan realisasi 20 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Persentase terangkutnya barang dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan dan indikator kinerja Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum dengan target 80 % dan realisasi 80 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 pada Indikator Kinerja Persentase terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP realisasi 20 % pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi kinerja sebesar 15%. Dilihat dari data tersebut terjadi kenaikan 5 %.
Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum dengan realisasi 80 % pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi kinerja sebesar 45%. Dilihat dari data tersebut terjadi kenaikan 25 %.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya rata-rata capaian kinerja sebesar 95.83 % tahun 2024. Dimana tahun 2021-2023 rata-rata capaian kinerja 94.84 % dan adanya penambahan indikator kinerja yaitu Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan dari sisi indikator kinerja dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta rata-rata capaian kinerja sebesar 95.83 % tahun 2024 dan sebesar 95.11 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - j. Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - k. Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

- l. Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
- m. Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi dikarenakan adanya keterlambatan pengesahan anggaran perubahan sehingga penjadwalan penyerapan anggaran belum optimal dan beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi karena terbatasnya SDM sehingga kegiatan terlambat untuk diselesaikan.

- c. Rencana Tindak Lanjut
 - n. Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
 - o. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
 - p. Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Perkeretaapian
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi

- Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi
- Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1) Eselon IV (Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 25
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Terlaksananya sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan	Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

	penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi	angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi			
2	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan provinsi	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan provinsi	4 Laporan	4 Laporan	100 %
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi yaitu Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi yang terlaksana

- Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan provinsi yaitu

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum tidak dalam trayek yang berizin}}{\text{Jumlah Total Data terdaftar}} \times 100 \%$$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 26
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan provinsi	-	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %
Rata-Rata Capaian							100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Terlaksananya sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi dengan target 2 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan provinsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan provinsi dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024. Dimana tahun 2022-2024 adanya penambahan strategis Terlaksananya sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan sasaran strategis

dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait

- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan

- c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi

2) Eselon IV (Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 27
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	91 unit	86 Unit	94.5 %
2	Terkendalinya dan terawasinya ketersediaan angkutan umum untuk orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi	420 Laporan	400 Laporan	95.23 %
3	Perumusan kebijakan penetapan jaringan jalur	Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringannya	3 Dokumen	0	0

	kereta api yang jaringangannya kewenangan provinsi	kewenangan provinsi yang ditetapkan			
Rata-Rata Capaian					63.24 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yaitu Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia tahun 2024
- Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi yaitu jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi yang tersedia
- Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi yang ditetapkan yaitu Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi yang ditetapkan

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 28
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	11 Buah	4015 Rit	6.570 Rit	91 unit	86	94.5 %

	Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
2	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi	420 Buah	420 Unit	1 Laporan	420 Laporan	400 Laporan	95.23 %
3	Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi yang ditetapkan	-	-	1 Dokumen	3 Dokumen	0	0 %
Rata-Rata Capaian							63.24 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi dan indikator kinerja Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target 91 Unit dan realisasi 86 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 94.5 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terkendalinya dan terawasinya ketersediaan angkutan umum untuk orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi dan indikator kinerja Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi dengan target 420 Laporan dan realisasi 400 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 95.23% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Perumusan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringangannya kewenangan provinsi dan indikator kinerja Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi yang ditetapkan dengan target 3 dokumen dan realisasi 0 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 0 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 63.24 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 75%. Dari data tersebut terjadi penurunan 11.76 %.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 84.56 % selama tahun 2021-2024. Dimana tahun 2023-2024 adanya penambahan sasaran strategis Perumusan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringangannya kewenangan provinsi dan indikator kinerja Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi yang ditetapkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan sasaran strategis dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 63.24 % tahun 2024 dan sebesar 84.56 % rata-rata capaian dari 2021-2024.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
 - Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi dikarenakan adanya keterlambatan pengesahan anggaran perubahan sehingga penjadwalan penyerapan anggaran belum optimal dan beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi karena terbatasnya SDM sehingga kegiatan terlambat untuk diselesaikan.

- b. Rencana Tindak Lanjut
- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
 - Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
 - Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Perkeretaapian
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 - a. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
 - b. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3) Eselon IV (Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 29
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan perizinan	Jumlah laporan fasilitas pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	100 %

	berusaha terintegrasi secara elektronik	perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik			
2	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	100 %
3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	100 %
4	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam	12 Laporan	12 Laporan	100 %

	1 (satu) Daerah Provinsi	1 (satu) Daerah Provinsi			
5	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	100 %
6	Terselenggaranya Penyusunan Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	4 Laporan	100 %
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Jumlah laporan fasilitasi pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yaitu Jumlah laporan fasilitasi pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang tersedia
- Jumlah laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi yaitu Jumlah laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi yang tersedia
- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yaitu Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yang tersedia
- Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia
- Jumlah Laporan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu Jumlah Laporan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia
- Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi yaitu Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang tersedia
- Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yaitu Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersedia

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 30
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah laporan fasilitasi pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100 %
2	Jumlah laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi	-	2 Laporan	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100 %
3	Jumlah Laporan Koordinasi dan	4 Buah	4 Dokumen	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %

	Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi						
4	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
5	Jumlah Laporan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100 %
6	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

	Perkotaan Kewenangan Provinsi						
7	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100 %
Rata-Rata Capaian							100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan indikator kinerja Jumlah laporan fasilitasi pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi dan indikator kinerja Jumlah laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi dengan target 2 Laporan dan realisasi 2 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Laporan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terselenggaranya Penyusunan Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan indikator kinerja Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024. Dimana tahun

2021-2024 adanya penambahan sasaran strategis sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan sasaran strategis dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait

- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi dikarenakan adanya keterlambatan pengesahan anggaran perubahan sehingga penjadwalan penyerapan anggaran belum optimal dan beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi karena terbatasnya SDM sehingga kegiatan terlambat untuk diselesaikan.

- c. Rencana Tindak Lanjut
1. Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
 2. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
 3. Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
3. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
5. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

6. Eselon III (Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 31
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan	Persentase angkutan umum yang lolos Uji KIR/laik jalan	100%	100%	100%
		Persentase kecelakaan angkutan umum di jalan (fatality accident)	0%	0%	100%
		Persentase penurunan angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas	100%	100%	100%
		Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024

Rumus Perhitungan :

Persentase angkutan umum yang lolos Uji KIR/laik jalan yaitu

$$\frac{\text{angkutan umum yang lolos Uji KIR/laik jalan}}{\text{angkutan umum yang Uji KIR/laik jalan}} \times 100\%$$

Persentase kecelakaan angkutan umum di jalan (fatality accident) yaitu

$$\frac{\text{jumlah kejadian kecelakaan angkutan penumpang dan barang}}{100.000 \text{ Keberangkatan}} \times 100\%$$

Persentase penurunan angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas yaitu

$$\frac{\text{angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas}}{100.000 \text{ Keberangkatan}} \times 100\%$$

Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa yaitu

Perbandingan antara Segmen Terdampak yang ditangani (X) dengan Jumlah Total Segment yang diperkirakan terdampak dari pembangunan (Y).

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 32
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase angkutan umum yang lolos Uji KIR/laik jalan	-	74%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kecelakaan angkutan umum di jalan (fatality accident)	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3	Persentase penurunan angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas	-	96%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa	-	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian							100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan memiliki indikator kinerja sebanyak 4 indikator yaitu :

Persentase angkutan umum yang lolos Uji KIR/laik jalan dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Persentase kecelakaan angkutan umum di jalan (fatality accident) dengan target 0 % dan realisasi 0 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Persentase penurunan angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas Realisasi kinerja serta rata-rata capaian kinerja 100% pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan rata-rata capaian 100%
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024. Dimana tahun 2021-2023 rata-rata capaian kinerja 100 % dan adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2022-2024 yaitu Persentase angkutan umum yang lolos Uji KIR/laik jalan, Persentase penurunan angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas dan Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan dari sisi indikator kinerja dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran

- Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi semakin ditemukan kendaraan angkutan umum barang yang buku Uji kendaraannya habis masa berlaku yang disebabkan ketatnya uji kelulusan di UPPKB dengan mempersyaratkan ukuran standart kendaraan harus sesuai dengan sertifikasi Uji Tipe (SERUT).

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Memperketat pengawasan kendaraan dengan melaksanakan pemeriksaan Buku KIR Kendaraan yang dipermudah dengan sistem BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik) yang terdiri dari dua sertifikat tanda lulus uji, dua stiker hologram dengan QR Code yang ditempel pada kaca depan kendaraan dan satu Smart Card dengan teknologi NFC untuk mendorong kendaraan angkutan barang/penumpang umum agar menyesuaikan dengan sertifikasi Uji Tipe (SERUT).
- Menambahkan kelengkapan jalan yang belum terpasang perlengkapan jalan di jalan provinsi
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
3. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi
4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
6. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan

1) Eselon IV (Kepala Seksi Operasional dan Pengendalilan Lalu Lintas)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Operasional dan Pengendalilan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 33
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	12 Laporan	11 Laporan	92 %
Rata-Rata Capaian					92 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi yaitu Jumlah kegiatan pengawasan yang terlaksana dan telah dilaporkan sesuai dengan jumlah rencana kegiatan sesuai dengan yang peranggarkan selama satu tahun anaggaran berjalan.

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 34
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	20 Ruas	13 Kab/Kota	12 Laporan	12 Laporan	11 Laporan	92 %
Rata-Rata Capaian							92 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi dan indikator kinerja Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi dengan target 12 Laporan dan realisasi 11 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 92 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%. Dilihat dari data tersebut terjadi penurunan 8 %.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 98 % selama tahun 2021-2024.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 92 % tahun 2024 dan sebesar 98 % rata-rata capaian dari 2021-2024.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait

- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan .

- c. Rencana Tindak Lanjut
 - Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
 - Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
 - Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

2) Eselon IV (Kepala Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 35
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersedianya Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang tersedia	4006 Unit	4006 Unit	100 %
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	704 Unit	704 Unit	100 %
3	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	13 Laporan	13 Laporan	100 %
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang tersedia yaitu Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang terpasang dibagi jumlah kebutuhan
- Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara yaitu Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang terpelihara dibagi jumlah jumlah perlengkapan jalan yang terpasang
- Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yaitu Jumlah unit Pelaksana pengujian bermotor yang ada di kalsel terhadap jumlah unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang dibina

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 36
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang tersedia	279 Unit	1239 unit	926 Unit	4006 Unit	4006 Unit	100 %
2	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	80 Unit	431 Unit	372 unit	704 Unit	704 Unit	100 %
3	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	13 Buah	4 Kab/Kota	13 laporan	13 Laporan	13 Laporan	100 %
Rata-Rata Capaian							100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang tersedia dengan target 4006 Unit dan realisasi 4006 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dan indikator kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara dengan target 704 Unit dan realisasi 704 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan indikator kinerja Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan target 13 Laporan dan realisasi 13 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

- Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
- Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan .

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3) Eselon IV (Kepala Seksi Manejemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Manejemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 37
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Terlaksananya penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	Terlaksananya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	6 Laporan	6 Laporan	100 %
3	Terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi	4 Laporan	7 Laporan	175 %
4	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	6 Laporan	15 Laporan	250 %

5	Terawasinya pelaksanaan rekomendasi andalalin	Jumlah laporan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang terawasi	10 Laporan	10 Laporan	100 %
6	Terlaksananya Uji coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
Rata-Rata Capaian					137 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi yaitu Tersajikan Dokumen Rencana Induk LLAJ untuk Jaringan Jalan Provinsi.
- Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi yaitu Perbandingan antara Segmen Terdampak yang ditangani (X) dengan Jumlah Total Segment yang diperkirakan terdampak dari pembangunan (Y).
- Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi yaitu Perbandingan antara Pelaksanaan Koordinasi Forum LLAJ (X) dengan Jumlah Rencana permasalahan LLAJ yang akan timbul (Y).
- Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin yaitu Perbandingan antara Jumlah Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan (X) dengan Jumlah Dokumen Andalalin yang masuk (Y).
- Jumlah laporan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang terawasi yaitu Perbandingan antara Jumlah pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap rekomendasi suatu kegiatan/usaha (X) dengan Jumlah Rekomendasi yang telah diterbitkan (Y).

- Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi yaitu Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 38
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	-	-	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	-	5 Ruas	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100 %
3	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi	-	8 kali	6 Laporan	4 Laporan	7 Laporan	175 %
4	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	-	-	11 Laporan	6 Laporan	15 Laporan	250 %

	penilaian hasil andalalin						
5	Jumlah laporan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang terawasi	20 Ruas	10 Dokumen	6 Kali	10 Laporan	10 Laporan	100 %
6	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	13 kab/kota	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
Rata-Rata Capaian							137 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Terlaksananya penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi dan indikator kinerja Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi dan indikator kinerja Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi dengan target 6 Laporan dan realisasi 6 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi dan indikator kinerja Jumlah laporan forum

lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi dengan target 4 Laporan dan realisasi 7 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 175 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin dan indikator kinerja Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin dengan target 6 Laporan dan realisasi 15 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 250 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terawasinya pelaksanaan rekomendasi andalalin dan indikator kinerja Jumlah laporan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang terawasi dengan target 10 Laporan dan realisasi 10 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya Uji coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 137 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024. Dilihat dari data tersebut di atas ada penambahan indikator kineja pada tahun 2022-2024 sehingga tidak dapat menjadi pembanding.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan sasaran strategis satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait

- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan

- c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
2. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
5. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

7. Eselon III (Kepala UPTD Terminal Tipe B)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala UPTD Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

Tabel 3. 39
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Peningkatan Pelayanan Bidang Transportasi UPTD Terminal Tipe B	Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Terminal Tipe B	77,5%	78%	100%
2	Pelayanan Jasa Administrasi Tata Usaha Kantor UPTD Terminal Tipe B	Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B	100%	100%	100%
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B	100%	100%	100%
		Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024

Rumus Perhitungan :

Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Terminal Tipe B yaitu Survey kepuasan Pengguna Terminal Tipe B

Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B yaitu

$$\frac{\text{Jumlah Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang tersusun}}{\text{Jumlah Perencanaan dan Pengelolaan keuangan yang di kelola}} \times 100\%$$

Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B yaitu

$$\frac{\text{Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian yang dilayani}}{\text{Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian yang diajukan}} \times 100\%$$

Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B yaitu Jumlah Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan yang disusun dan dilaporkan

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 40
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Terminal Tipe B	80 %	77,55%	77,55%	77,5%	78%	100%
2	Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B	-	96,22%	96,22%	100%	100%	100%

3	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B	-	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B	-	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian							100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Peningkatan Pelayanan Bidang Transportasi UPTD Terminal Tipe B dan indikator kinerja Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Terminal Tipe B dengan target 77.5 % dan realisasi 78 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Pelayanan Jasa Administrasi Tata Usaha Kantor UPTD Terminal Tipe B memiliki indikator kinerja sebanyak 3 indikator yaitu :

Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B dengan target 100 %dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B dengan target 100 %dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B dengan target 100 %dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas Realisasi kinerja serta rata-rata capaian kinerja 100% pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan rata-rata capaian 99,05%. Dllihat dari data tersebut adanya kenaikan 0.95 %
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024. Dimana tahun 2021-2023 rata-rata capaian kinerja 99,35 % dan adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2022-2024 yaitu Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B, Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B dan Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan dari sisi indikator kinerja yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 99,5% rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan
- c. Rencana Tindak Lanjut
 - Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.

- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.
- Meningkatkan pelayanan terminal, sarana dan prasarana

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

1) Eselon IV (Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah I Provinsi Kalimantan Selatan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah I Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 41
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Berkembangnya sarana dan prasarana terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	5 Unit	5 Unit	100 %
2	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	100 %
3	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	47 Unit	42 Unit	89.36%
Rata-Rata Capaian					96,45 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B yang dilakukan Pengembangan dibagi dengan Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B yang diajukan dikali 100%
- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi yaitu Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi di bagi dengan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi di kali 100%

- Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan yaitu Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di ajukan

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 42
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	80 %	52 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %
2	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	-	-	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
3	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	-	-	26 Unit	47 Unit	42 Unit	89.36%
Rata-Rata Capaian							96,45 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Berkembangnya sarana dan prasarana terminal dan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan dengan target 5 Unit dan realisasi 5 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dan indikator kinerja Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi dengan target 1 Unit dan realisasi 1 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dan indikator kinerja Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan dengan target 47 Unit dan realisasi 42 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 89.36% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 96,45 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%. Dilihat dari data tersebut terjadi penurunan sebesar 3,55 %
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 99,11 % selama tahun 2021-2024 dan adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2023-2024 yaitu Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi dan Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 96,45 % % tahun 2024 dan sebesar 99,11 % rata-rata capaian dari 2021-2024.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek

- Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan

- c. Rencana Tindak Lanjut
 - Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
 - Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
 - Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Lainnya
 -

2) Eselon IV (Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 43
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100 %
Rata-Rata Capaian					100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yaitu Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 44
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	80 %	26 %	1 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %
Rata-Rata Capaian							100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasidengan target 3 Unit dan realisasi 3 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024 dan adanya perbedaan satuan target sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan

- c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.
- Meningkatkan administrasi perkantoran, kepegawaian, dan sarana/prasarana untuk menunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran dan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatkan Disiplin Aparatur, menunjang kelancaran tugas perkantoran Dan meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, terciptanya kualitas kompetensi SDM Kantor untuk menunjang meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)

3) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Terminal Tipe B)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 45
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN terminal tipe b	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b	Jumlah laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b	4 Laporan	4 Laporan	100%
4	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%

5	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
6	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
7	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
8	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
9	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	166 Laporan	166 Laporan	100%
10	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100%
11	Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1 Laporan	1 Laporan	100%

		dan Listrik yang Disediakan			
12	Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100%
13	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7 Unit	87.5 %
14	Tersedianya pemeliharaan perakatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	23 Unit	23 Unit	100%
Rata-Rata Capaian					99.10 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan :

- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yaitu dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- Jumlah laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b yaitu laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b
- Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b yaitu Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b

- Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yaitu Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan
- Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan yaitu Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan yaitu Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
- Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan yaitu Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan
- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan yaitu Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
- Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yaitu Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
- Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan yaitu Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan yaitu Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 46
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Jumlah laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penysunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b	1 Dokumen	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
4	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 Stel	74 Stel	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
5	Jumlah paket komponen instalasi	0 Bulan	12 Bulan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%

	listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan						
6	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Bulan	12 Bulan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%
7	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 Bulan	12 Bulan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%
8	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	1 Bulan	12 Bulan	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokumen	100%
9	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	13 Orang	12 Bulan	124 Lapora n	166 Lapora n	166 Laporan	100%
10	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Buah	2 Buah	1 Unit	5 Unit	5 Unit	100%
11	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	3 Lapora n	1 Lapora n	1 Laporan	100%
12	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Laporan	100%
13	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	12 Bulan	12 Bulan	8 Unit	8 Unit	7 Unit	87.5 %

	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
14	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	-	12 Bulan	38 Unit	23 Unit	23 Unit	100%
Rata-Rata Capaian							99.10 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN terminal tipe b dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester terminal tipe b dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan

Sasaran strategis Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya barang cetakan dan pengadaan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan dengan target 2 Paket dan realisasi 2 Paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 166 Laporan dan realisasi 166 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target 5 Unit dan realisasi 5 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 4 Laporan dan realisasi 4

Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 8 Unit dan realisasi 7 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 87.5% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya pemeliharaan perakatan dan mesin lainnya dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara dengan target 23 Unit dan realisasi 23 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 99.10 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 98.94 %. Dilihat dari data tersebut ada kenaikan 0,16 %.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi sedikit perbedaan dari sisi indikator kinerja dan satuan target yang ditetapkan dan capaian kinerja sebesar 91,17 % selama tahun 2021-2024.
- c. Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 99.10 % tahun 2024 dan sebesar 91,17 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja
 - Selalu melakukan Koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi,

pelaporan dan Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Perhubungan Provinsi;

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan

c. Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi .

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024

Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 244.157.956.754,-

Realisasi Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 194.511.197.560,- atau 79.67 %

Tabel 3. 47
Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	KEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
DINAS PERHUBUNGAN				
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	32.488.453.149	24.813.485.976	76.38
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	963.018.700	704.957.832	73.2
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	565.887.500	375.704.393	66,39
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	17.628.500	16.133.500	91,52
2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.318.900	15.558.900	95,34
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.908.700	11.129.100	74,65

2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	14.448.300	13.186.100	91,26
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.126.900	39.155.523	76,58
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.699.900	234.090.316	82,81
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.560.798.888	12.467.858.570	80,12
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.321.727.988	12.274.093.426	80,11
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.285.000	156.550.000	84,04
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.785.900	37.215.144	70,5
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	501.879.000	335.962.200	66,94
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	501.879.000	335.962.200	66,94
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	278.736.000	170.698.858	61,24

2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.000.000	47.400.000	68,7
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	209.736.000	123.298.858	58,79
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.340.280.400	5.030.128.855	79,34
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.989.500	45.015.000	90,05
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.068.000	70.679.400	72,07
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.308.672.300	1.979.594.500	85,75
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.434.600	69.844.092	69,54
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	38.400.000	22.305.000	58,09
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.185.572.000	1.363.755.353	62,4
2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.559.144.000	1.478.935.510	94,86

2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.991.826.400	746.085.260	37,46
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	331.926.400	215.920.000	65,05
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.659.900.000	530.165.260	31,94
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.286.500.761	3.786.090.769	88,32
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.475.632.761	1.086.402.509	73,62
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.810.868.000	2.699.688.260	96,04
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.565.413.000	1.571.703.632	61,27
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.140.506.000	957.568.420	83,96
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.424.907.000	614.135.212	43,1

2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	206.420.023.005	165.570.057.474	80,21
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.082.168.400	1.032.406.798	95,4
2.15.02.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.082.168.400	1.032.406.798	95,4
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	143.069.220.170	113.067.115.784	79,03
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	129.974.985.670	107.543.260.824	82,74
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	13.094.234.500	5.523.854.960	42,19
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.163.462.900	1.854.287.829	85,71
2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	606.382.700	511.180.300	84,3
2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	226.310.200	173.955.968	76,87

	untuk Jaringan Jalan Provinsi			
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1.065.299.500	962.063.640	90,31
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	265.470.500	207.087.921	78,01
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	174.889.900	69.986.660	40,02
2.15.02.1.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	146.055.700	57.408.960	39,31
2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	28.834.200	12.577.700	43,62
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	172.563.800	102.200.066	59,22
2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	88.242.800	79.695.900	90,31
2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	84.321.000	22.504.166	26,69

	Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	58.325.677.435	48.352.510.349	82,9
2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	35.300.800	24.563.632	69,58
2.15.02.1.08.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	58.290.376.635	48.327.946.717	82,91
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	661.998.600	580.408.500	87,68
2.15.02.1.09.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk	661.998.600	580.408.500	87,68

	Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.839.600	18.960.200	19,18
2.15.02.1.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	98.839.600	18.960.200	19,18
2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	177.031.000	144.194.140	81,45
2.15.02.1.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	177.031.000	144.194.140	81,45

2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	210.922.200	143.786.740	68,17
2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	48.580.100	12.225.100	25,16
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	162.342.100	131.561.640	81,04
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.182.900	132.076.308	87,94
2.15.02.1.14.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	150.182.900	132.076.308	87,94

	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi			
2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	133.066.100	72.124.100	54,2
2.15.02.1.15.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32.542.000	15.246.000	46,85
2.15.02.1.15.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.524.100	56.878.100	56,58
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4.749.480.600	4.127.654.110	86,9

2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	255.791.000	225.156.068	88,02
2.15.03.1.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255.791.000	225.156.068	88,02
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	326.525.900	301.262.170	92,26
2.15.03.1.05.03	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas	326.525.900	301.262.170	92,26

	Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	143.426.500	123.810.081	86,32
2.15.03.1.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo	143.426.500	123.810.081	86,32

	Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.023.737.200	3.477.425.791	86,42
2.15.03.1.10.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.718.750.400	3.184.541.585	85,63
2.15.03.1.10.08	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	304.986.800	292.884.206	96,03
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	500.000.000	0	0
2.15.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang	500.000.000	0	0

	Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.15.05.1.03.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	500.000.000	0	0
JUMLAH		244.157.956.754	194.511.197.560	79,67

Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 3.766.000.000,-

Realisasi Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 3.574.485.20,- atau 94.91%

Tabel 3. 48
Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 UPTD Terminal Tipe B

KODE REKENING	KEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
UPTD TERMINAL TIPE B				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.026.650.000	1.876.314.082	92,58
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.805.000	70.821.300	98,63
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.415.000	64.737.600	98,96
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.195.000	3.041.850	95,21

2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.195.000	3.041.850	95,21
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.000.000	56.943.000	99,9
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57.000.000	56.943.000	99,9
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.364.100	494.918.694	92,45
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.098.800	50.308.000	96,56
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.087.300	61.421.800	95,84
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.999.000	33.982.594	97,1
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	4.173.000	86,94
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.379.000	345.033.300	90,95
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183.500.000	153.060.000	83,41
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.500.000	43.610.000	98
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.000.000	109.450.000	78,74
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	868.540.900	796.583.588	91,71

	Pemerintahan Daerah			
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.000.000	119.494.648	73,76
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.540.900	677.088.940	95,83
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.440.000	303.987.500	97,92
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.560.000	90.592.500	98,94
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.960.000	17.745.000	93,59
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.920.000	195.650.000	97,86
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.739.350.000	1.698.171.127	97,63
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1.739.350.000	1.698.171.127	97,63
2.15.02.1.03.06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	1.205.266.000	1.174.469.180	97,44
2.15.02.1.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	534.084.000	523.701.947	98,06
JUMLAH		3.766.000.000	3.574.485.209	94,91

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.

Anggaran berdasarkan sasaran program Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

Tabel 3. 49
Anggaran sasaran program Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Sasaran Strategis	Program Prioritas			
	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
- Terwujudnya Konektivitas Provinsi - Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi - Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	32.488.453.149	24.813.485.976	76.38
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	206.420.023.005	165.570.057.474	80,21
	Program Pengelolaan Pelayaran	4.749.480.600	4.127.654.110	86,9
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	500.000.000	0	0

Anggaran berdasarkan sasaran program UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

Tabel 3. 50
Anggaran berdasarkan sasaran program UPTD Terminal Tipe B

Sasaran Strategis	Program Prioritas			
	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
- Peningkatan Pelayanan Bidang Transportasi UPTD Terminal Tipe B	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	2.026.650.000	1.876.314.082	92,58
- Pelayanan Jasa Administrasi Tata Usaha Kantor UPTD Terminal Tipe B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.739.350.000	1.698.171.127	97,63

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024 pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

Tabel 3. 51
Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

No	2023		2024	
	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

9	PROGRAM PENYELENG GARAAN	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	PROGRAM PENYELEN GGARAAN	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
10	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	LALU LINTAS DAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
11	JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
12		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
13		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
14		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
15		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
16		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui

		Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
17		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
18		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
19		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
20	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah

		antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		
21		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
22		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
23		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi,

		Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
24	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETA APIAN	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
25			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETA APIAN	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Total			Total	
4		24	4	25
Total Anggaran			Total Anggaran	
74.186.249.054		74.186.249.054	244.157.956.754	244.157.956.754

Tabel 3. 52
Belanja Langsung Dinas Perhubungan

No.	2023		2024	
	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Langsung	Jumlah
1	Belanja Pegawai	11.008.212.373	Belanja Pegawai	12.428.893.426
2	Belanja Barang dan Jasa	18.115.037.169	Belanja Barang dan Jasa	70.528.083.874
3	Belanja Modal	40.327.963.200	Belanja Modal	111.554.220.260
4	Belanja Hibah	2.141.611.000	Belanja Hibah	-
	Total	71.592.823.742	Total	194.511.197.560

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024 pada UPTD
Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

Tabel 3. 53
Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024 pada UPTD Terminal

No	2023		2024	
	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		Urusan Pemerintah Daerah		
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
Total			Total	
2		7	2	7
Total Anggaran			Total Anggaran	
3.771.000.000		3.771.000.000	3.766.000.000	3.766.000.000

Tabel 3. 54
Belanja Langsung UPTD Terminal Tipe B

No.	2023		2024	
	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Langsung	Jumlah
1	Belanja Barang dan Jasa	3.292.500.000	Belanja Barang dan Jasa	3.512.500.000
2	Belanja Modal	478.500.000	Belanja Modal	183.500.000
	Total	3.771.000.000	Total	3.696.000.000

4. Analisa Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik dan pencegahan pemborosan anggaran, harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut disampaikan penggunaan sumber daya anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024:

Tabel 3. 55
Efektifitas dan Efisiensi Dinas Perhubungan

Sasaran Strategis	Uraian	Anggaran	Realisasi	Penghematan	Capaian penghematan	Tingkat Analisa
- Terwujudnya Konektivitas Provinsi Dengan Capaian Kinerja 103%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	32.488.453.149	24.813.485.976	7.674.967.173	23,6	Efektif dan Efisien
- Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan Dengan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	206.420.023.005	165.570.057.474	40.849.965.531	19,8	Efektif dan Efisien

Capaian Kinerja 122% - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi Dengan Capaian Kinerja 99% - Meningkatkan Keselamatan Transportasi Dengan Capaian Kinerja 100%	Program Pengelolaan Pelayaran	4.749.480.600	4.127.654.110	621.826.490	13,1	Efektif dan Efisien
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	500.000.000	0	500.000.000	100,0	Efektif dan Efisien

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik dan pencegahan pemborosan anggaran, harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut disampaikan penggunaan sumber daya anggaran UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024:

Tabel 3. 56
Efektifitas dan Efisiensi UPTD Terminal Tipe B

Sasaran Strategis	Uraian	Anggaran	Realisasi	Penghematan	Capaian penghematan	Tingkat Analisa
- Peningkatan Pelayanan Bidang	Program Penunjang Urusan Pemerintah	2.026.650.000	1.876.314.082	150.335.918	7,4	Efektif dan Efisien

Transportasi UPTD Terminal Tipe B Dengan Capaian Kinerja 100 %	Daerah Provinsi					
- Pelayanan Jasa Administrasi Tata Usaha Kantor UPTD Terminal Tipe B Dengan Capaian Kinerja 100%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.739.350.000	1.698.171.127	41.178.873	2,4	Efektif dan Efisien

Dihat dari data tersebut tidak ada dana yang menyebabkan pemborosan pada Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal Tipe B.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut: Dari 4 (empat) sasaran strategis Dinas Perhubungan yang dijanjikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 didukung oleh 4 indikator, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang telah mencapai dan melebihi dari target yang yaitu 104 % Sangat Memuaskan, dengan rincian 86 (Delapan Puluh Enam) Indikator Kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Memuaskan, 7 (tujuh) Indikator Kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Memuaskan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Baik.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 244.157.956.754,-. Serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 194.511.197.560,- atau 79.67 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 49.646.759.194,- atau 20.33%. UPTD Terminal Tipe B pada tahun 2024 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.766.000.000,- dengan serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 3.574.485.20,- atau 94.91.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai kinerja yang lebih baik yaitu :

1. Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi
2. Memaksimalkan serapan penggunaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan monitoring internal terkait pelaksanaan kegiatan pada Satuan kerja Perangkat Daerah
4. Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
5. Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek perhubungan.

6. Meningkatkan rasio konektivitas provinsi dengan penambahan Jumlah Trayek yang merupakan rute kewenangan provinsi dan Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi serta mengupayakan Pembangunan terminal terpadu sebagai dukungan terkait penambahan nilai rasio konektivitas provinsi.
7. Meningkatkan On time performance layanan transportasi (Darat dan Air) dengan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan penyediaan jasa angkutan umum massal perkotaan.
8. Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi dengan terus mengupayakan pelayanan yang efektif, efisien dan tepat waktu.
9. Meningkatkan Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan dalam proses pencapaian kinerja Satuan kerja perangkat daerah.
10. Meningkatkan Pemasangan Perlengkapan jalan di jalan provinsi

Demikian LAKIP ini dibuat dengan harapan sedikit tergambar kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pembangunan di sektor Perhubungan yang mengutamakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian. Semoga laporan LAKIP ini bermanfaat bagi upaya pengembangan di Bidang Transportasi dan menjadi pedoman dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada masa yang akan datang

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk tahun mendatang upaya pencapaian kinerja yang lebih baik akan terus dilakukan, untuk itu kami akan melakukan beberapa hal, yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur, melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan strata pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan terutama pada sektor perhubungan khususnya terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi yang efektifm efisien, nyaman, aman, tertib, bersih dan tepat waktu.
3. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana dalam pelayanan Publik untuk Bidang Perhubungan dan Terminal.

4. Meningkatkan keselamatan di jalan Provinsi dan sungai dengan pengadaan Fasilitas Keselamatan yang sesuai standar.
5. Koordinasi sinergitas, kerjasama dan dukungan instansi lain diantaranya yaitu :
 - a. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, terkait dengan rencana kerja antara Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se – Kalimantan Selatan.
 - b. Kementerian Perhubungan, berkaitan dengan sinkronisasi program kerja Perhubungan dengan Provinsi dan Kota untuk menentukan prioritas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terkait pembinaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Zona Integritas (Wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Bersih Bebas Melayani/WBBM)
 - d. Biro Organisasi terkait pengembangan kelembagaan tata laksana dan akuntabilitas SKPD.
 - e. Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), berkaitan dengan perencanaan kinerja perhubungan yang termasuk dalam bidang Infrastruktur Kewilayahan.
 - f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), berkaitan dengan kerjasama dan pengembangan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
 - g. Instansi vertikal lainnya yang menjadi satuan kesatuan dalam mendorong dan mendukung terhadap kinerja perhubungan. Yang mana dalam perkembangan kedepannya memerlukan banyak Kerjasama lintas sektor.